

KUMPULAN ABSTRAK

Fakultas Hukum,
Jurusan Hukum

“Konsentrasi
Hukum Perdata”

Darma, S.I.Pust



Daftar Isi

A. ABSTRAK SKRIPSI TAHUN 2020

Analisis hukum status perkawinan beda agama

Angelia Chandra..... 1

Keabsahan hak atas tanah yang belum dikonversi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Desy Ramadhanty 2

Analisis hukum terhadap peralihan hak bawah tangan kredit pemilikan rumah bersubsidi ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Devita Rezki Widyasari 3

Implementasi peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dikota Pangkalpinang

Kartika Emillia Putri 4

Perlindungan hukum bagi shahibul maal dalam pemberian akad mudharabah pada Bank Syariah

Nada Irma..... 5

Kekuatan hukum R n D PT Lion mentari sebagai dasar pemberian ganti rugi bagi ahli waris korban jatuhnya pesawat lion air jt-610 ditinjau dari perjanjian pengangkutan

Nadhilah Nur Zain..... 6

Kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing desa Mapur Kabupaten Bangka yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung

Nasrirudin Baidowi 7

Akibat hukum pelaku usaha online terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus usaha online link shop)

Niki Aprilia..... 8

Kekuatan eksekutorial putusan badan arbitrase nasional Indonesia (studi kasus putusan BANI No. 531/VII/ARB/BANI/2013)	
Nurseha	9
Efektivitas hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pangkalpinang	
Ovi Oktavianti	10
Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis lada putih muntok (Muntok White Pepper) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat	
Pearl Princila Manurung.....	11
Penerapan kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat	
Sinta Afriyanti	12
Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun pulau nangka Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah (analisis surat edaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah nomor: 593/84/19.04.03/2016 tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria)	
Suharti	13
B. ABSTRAK SKRIPSI LULUSAN TAHUN 2021	
Pengaturan bank tanah dalam kaitannya dengan reforma agraria	
Adytia Cempaka Kasih.....	14
Keabsahan surat kuasa dari pekerja kepada serikat pekerja lintas sektor berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja	
Ahmad Adi Saputra.....	15
Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Pangkalpinang	
Aldi Setiawan	16
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum (Studi Kasus di Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka)	
Almaidar Rizki Ayu	17

Efektivitas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan di Indonesia ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi kasus di PT Timah Tbk.)	
Anggar Dian Tiffany.....	18
Implikasi asas itikad baik pada transaksi jual beli online	
Aprilianna.....	19
Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2010/PN Niaga JKT.PST dalam kaitan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek	
Ardiansyah Jaya.....	20
Tanggung jawab penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur (studi kasus di toko bangunan Citra Sarana Material	
Bella Dwi Inanda	21
Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan	
Dayu Vandika	22
Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang	
Dilla Aprilia.....	23
Problematika hukum kompetensi peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan	
Dini Robbi Rodliyah.....	24
Upaya hukum pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak	
Efjuni Liensia	25
Kedudukan lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan pada transaksi over credit perjanjian di bawah tangan (studi terhadap putusan Pn.No.3/Pdt.G/2019/PN Pgp	
Farti Anisa Claudia Sinulingga	26

Analisis putusan nomor 11/PDT.G/2020/PNSGL dalam kaitanya dengan menaikan biaya sewa sepihak pada perjanjian sewa kios plaza taman sari Sungailiat	
Hadi Dharma Sulianto	27
Tanggung jawab keperdataan perusahaan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (studi kasus PT. Putra Tongga Samudera)	
Irvy Risti Widiatari	28
Penerapan itikad baik dalam perjanjian jual beli nanas Sistem Ijon di Desa Cengkong Abang	
Isdan	29
Penyelesaian sengketa wanprestasi pada praktek nominee di Indonesia (studi kasus putusan MA no. 193/PDT/2015/PT.DPS)	
Jefri GK Sinaga	30
Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis sebagai hak komunal masyarakat di Pulau Belitung	
Jodi Saputra	31
Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional	
Karina Aulia Sari.....	32
Pemenuhan hak alimentasi terhadap orang tua terlantar berdasarkan ranah hukum keperdataan	
Leony Tania.....	33
Akibat hukum larangan hak milik atas tanah pertanian secara Absentee	
Nadia Feblia.....	34
Implementasi hukum terhadap pelaku pengguna karya lagu oleh usaha kafe di Pangkalpinang	
Nengsi Fronika Tamba	35
Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kerahasiaan data transaksi pinjaman online	
Reko Maulana	36

Sinkronisasi antara undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbiterase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang posedur mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa	
Reza Algifari	37
Penerbitan surat keterangan tanah oleh lurah atas tanah dengan sertifikat ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah	
Ria Oktaviani.....	38
Akibat hukum kesalahan dalam pencatatan akta nikah	
Roby Ferdiansyah.....	39
Analisis hukum terhadap pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-phk dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja	
Ruth Octavia	40
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang	
Savira Nur Fajri.....	41
Perbandingan hukum perkawinan silariang antara hukum adat Bugis dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	
Shindy Alvionita Ayros.....	42
Pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi covid-19	
Sri Devi Natalia	43
Implikasi hukum perjanjian baku (klausula eksonerasi) dalam perjanjian kredit Leasing kendaraan bermotor	
Surya Jaya.....	44
Prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di kota Pangkalpinang	
Yessi Erika	45
Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian	
Yuliantika Caesaria.....	46
Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara setelah pembentukan holding company di Indonesia	
Zissi Maharesy.....	47

C. ABSTRAK SKRIPSI LULUSAN TAHUN 2022

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak berdasarkan kecakapan orang tua (analisis putusan nomor 3/Pdt.G/2019/PNSdk tentang gugatan perceraian	
Ahmad Salim Rais	48
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah BUMN yang mengalami penggabungan (merger)	
Ainurnisa Handayani	49
Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang (studi kasus putusan nomor 17/PDT.G/2021/PN. PGP) tentang perbuatan melawan hukum	
Alfia Nuriyani.....	50
Analisis hukum penggunaan bitcoin sebagai objek perjanjian di tinjau dari syarat sah perjanjian	
Alifya Vidhiannisa	51
Analisis yuridis kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia perspektif kepastian hukum (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 18/Puu-Xvii/2019)	
Anggun Rotami.....	52
Ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata	
Apni Mayanti.....	53
Problematika prinsip syirkah al-mudharabah di bank Sumsel Syariah cabang Pangkalpinang	
Ardea Pradana.....	54
Konsekuensi yuridis pernikahan siri di Indonesia	
Cendy Cenora.....	55
Kewajiban orang tua disabilitas dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak berdasarkan ranah Hukum Keperdataan	
Claranda Monika	56
Pembatalan waralaba (franchise) berdasarkan asas hukum perjanjian (studi putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 837/PDT.G/2021/PN.SBY)	
Deska Ramadaniati.....	57
Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan	
Dwi Ulfiani Saputri	58

Kekuatan pembuktian surat elektronik sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 300 K/PDT/2010)	
Esti Novianti.....	59
Problematika pengaturan jabatan rangkap komisaris BUMN ditinjau dari pendekatan Rule Of Reason dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	
Ferlisa Fanisda	60
Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology	
Iranti Lamtiar Purba.....	61
Force Majeure sebagai dasar pemutusan hubungan kerja selama pandemi covid-19 di Indonesia	
Lintang Tirta	62
Penyelesaian sengketa pemutusan kontrak kerja antara atlet e-sport dengan manajemen tim	
M.Rafli Mustofa	63
Wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang secara lisan dalam konstruksi hukum perdata dikaitkan dengan pembuktian	
Marsilia Anjeli	64
Pengalihan objek jaminan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di yamaha varia motor Belinyu	
Melisa.....	65
Analisis terhadap peraturan menteri permendag RI nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dalam melindungi hak konsumen	
Monica Romauli Situmeang	66
Pembagian waris masyarakat minangkabau di kecamatan Girimaya kota Pangkalpinang ditinjau dari hukum islam hukum adat dan hukum perdata	
Muhammad Fikri.....	67
Perlindungan hukum karya cipta fotografi di media sosial terkait produk iklan tanpa izin guna kepentingan komersil	
Mujuranto Sihotang.....	68
Akibat hukum perbedaan pencatuman informasi harga pada display dengan sistem pembayaran supermarket ditinjau dari ketentuan umum dalam hukum perjanjian	
Nadya Anggraini Pratiwi	69

Penyelesaian kasus pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan Pangkalpinang	
Nida Ayu Hasana	70
Pemenuhan prinsip dasar triple bottom line pada pengaturan corporate social responsibility (csr) perseroan terbatas	
Noviza Caresi	71
Mediasi sengketa pertahanan oleh badan pertahanan nasional kabupaten Belitung	
Rahayu Gumilang	72
Kekuatan alat bukti surat pada penyelesaian sengketa kartel berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat	
Regita Berlinda.....	73
Kedudukan hukum anak luar kawin dalam pembagian warisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/Puu-Viii/2010	
Renilda Filian Dini	74
Status PT. Timah Tbk setelah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero)	
Ruth Syarma Apriani Sirait.....	75
Kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta anah (PPAT) kerhadap proses pengikatan kredit	
Sofie Ananda	76
Perbandingan sistem suku bunga dalam gadai konvensional dan mu'nal, dalam gadai syariah	
Syadid Demurian	77
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (het) di kota Pangkalpinang	
Thasia Avresta Jergi	78
Keabsahan hukum peralihan hak objek kredit pemilikan rumah (take over KPR) dengan perjanjian jual beli di bawah tangan	
Valentin Oktaviani	79
Tanggung jawab perdata pelaku usaha penjualan obat kadaluarsa terhadap konsumen di Kota Pangkalpinang	
Veni Rosalina.....	80

Dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak (studi penetapan pengadilan agama Tanjungpandan nomor 82/Pdt.P/2021/Pa.Tdn tentang permohonan dispensasi kawin)
Windah Nurfatimah 81

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pembeli
Yoga Triansyah 82

Wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah pada lembaga perbankan syariah
Yoziandika 83

D. ASTRAK SKRIPSI LULUSAN TAHUN 2023

Analisis yuridis pembatalan hibah berdasarkan putusan pengadilan tinggi agama Palu Nomor: 0018/PDT.G/2017/PTA.PAL

Achmad Fahrul Rozi 84

Analisis yuridis perjanjian jual putus dalam pengalihan hak ekonomi atas hak cipta

Amanda Try Ayu Kinanti 85

Kekuatan hukum lelang online berdasarkan peraturan menteri nomor 213/pmk.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Anisah Wijaya 86

Status kepemilikan rumah susun setelah berakhirnya hak guna bangunan

Armila 87

Analisis yuridis pengalihan hak rahasia dagang sebagai objek wakaf perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Betry Soraya Simamora 88

Keabsahan perjanjian yang dibuat oleh orang dengan down syndrome
Desea Natalina 89

Kepastian hukum jual beli tanah di bawah tangan

Dhika Yudhistira 90

Keabsahan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi dalam peer to peer lending

Dinar Rosyada 91

Kekuatan hukum bagi pendaftar pertama dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia	92
Fheta Morgika Dealesta.....	
Penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara wanprestasi surat pernyataan hutang (studi kasus putusan 40/Pdt.g/2020/PN Sgl)	93
Hafiz Jutawan Sarwar	
Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penerapan persyaratan hygiene sanitasi produk makanan oleh pelaku usaha (studi kasus usaha mikro di kota Pangkalpinang)	94
Juwita Alisandri	
Putusan hakim pengadilan agama purbalingga nomor 0181/pdt.p/2015/pa.pbg terkait pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi rasa adil	95
Nadien Salsabila	
Perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan qrис (quick response code Indonesian standard) sebagai media transaksi elektronik	96
Nelsi Deswita	
Pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam perspektif undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	97
Nisa Aulia Rahmadani	
Keabsahan perjanjian waralaba atas usaha yang berjalan kurang dari dua tahun berdasarkan hukum perdata di Indonesia (studi kasus perjanjian waralaba traffic bun)	98
Novela Riren.....	
Perlindungan hukum terhadap pasien pengobatan tradisional dalam perspektif hukum kesehatan	99
Novira Metrianti.....	
Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal varietas lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100
Reiner Indra Putra Muara Simaremare	
Akibat hukum pengambilan hak atas tanah masyarakat dalam penggunaan lahan hak guna usaha yang melebihi batas di Kecamatan Lepar Pongok	101
Reyuka.....	

Sengketa jual beli tanah waris tanpa ada persetujuan ahli waris di Kabupaten Bangka
Rifani Nabila Amanda.....102

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan snack merek terkenal yang telah kadaluarsa dan dikemas ulang
Vanetta Novania Theny.....103

Kekuatan hukum eksekusi penjualan di bawah tangan dalam hukum jaminan ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pgp)
Wulan Dwiningrum.....104



KUMPULAN ABSTRAK LULUSAN TAHUN 2020



Analisis hukum status perkawinan beda agama

Angelia Chandra
NIM. 4011611013

Abstrak

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbulpun akan semakin kompleks juga, perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan jelas-jelas dilarang untuk dilakukan yaitu perkawinan beda agama. Padahal setiap agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan diantara pria dan wanita yang satu agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui legalitas Hukum perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu Pertama, Status perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan agama islam yaitu Kompilasi Hukum Islam, Hadis, dan al-Qur-an menyatakan perkawinan beda agama tidak sah . Kedua Tidak adanya aturan secara khusus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, membuat para pasangan menempuh berbagai cara agar perkawinan beda agama dapat berlangsung. Salah satu caranya adalah perkawinan di luar negeri dan mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di wilayah tempat tinggal mereka.di Indonesia

Keywords = Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Catatan Sipil
link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3907>

Keabsahan hak atas tanah yang belum dikonversi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Desy Ramadhyanty
NIM. 4011611021

Abstrak

Konversi hak atas tanah ialah perubahan hak atas tanah. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Konversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan untuk mengetahui Keabsahan Hak Atas Tanah yang Belum Dikonversi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu Bagaimana Pengaturan Konversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria? dan, Bagaimana Keabsahan Hak Atas Tanah yang Belum Dikonversi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu konversi membuatkan hak-hak lama mempunyai kepastian hukum, dapat menjadi alat pembuktian yang kuat saat sengketa, dan Keabsahan hak atas tanah yang belum dikonversi dalam jangka waktu ditentukan yaitu 20 tahun, maka tanah tersebut secara hukum akan kembali ke negara. Penulis menyarankan Pengaturan konversi yang diatur dalam UUPA memerlukan pengaturan pelaksananya, sehingga menjadi jelas untuk diterapkan, dan pemerintah harus tegas mencabut surat tanah yang dikeluarkan Belanda apabila pemiliknya terlambat melakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya kembali pada pemerintah.

keywords = Keabsahan; Konversi; Hak Atas Tanah

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3801>

Analisis hukum terhadap peralihan hak bawah tangan kredit pemilikan rumah bersubsidi ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Devita Rezki Widyasari
NIM. 4011611023

Abstrak

Peralihan hak bawah tangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh debitur dalam usahanya untuk mengalihkan kewajiban pembayaran kreditnya kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak Notaris. Tujuan penelitian yaitu, pertama untuk mengetahui kekuatan hukum mengenai peralihan hak perumahan bersubsidi di bawah tangan, kedua untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur pengganti dalam peralihan hak perumahan bersubsidi di bawah tangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu, pertama proses pengalihan hak kredit seperti ini banyak dijumpai dalam praktek tanpa sepengetahuan pihak bank atau dikenal oleh masyarakat dan berdasarkan Pasal 135 UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain. Bagi yang melanggar akan dikenakan denda Rp. 50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah berdasarkan Pasal 152 UU No. 1 Tahun 2011. Kedua, perlindungan hukum bagi pihak debitur pengganti sangat lemah. Hal ini dikarenakan pihak bank hanya mengetahui bahwa nama debitur pertama yang masih terikat perjanjian dengan pihak bank.

keywords = Peralihan hak bawah tangan; Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3945>

Implementasi peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dikota Pangkalpinang

Kartika Emilia Putri
NIM. 4011611043

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencantuman harga pada barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan oleh pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam penelitian ini termasuk dalam perikatan yang lahir dari undang-undang dan terbit dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Pangkalpinang akibat tidak dicantumkannya daftar harga pada usahanya dapat melakukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada pelaku usaha; kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat, belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pangkalpinang.

keywords = implementasi, peraturan menteri, pencantuman harga, pelaku usaha, konsumen

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3229>

Perlindungan hukum bagi shahibul maal dalam pembiayaan akad mudharabah pada Bank Syariah

Nada Irma
NIM. 4011611056

Abstrak

Bank bersifat intermediatif (perantara), maka bank bisa berposisi ganda. Pertama, sebagai shahibul maal, karena bank menyalurkan modal dari nasabah kepada pihak ketiga. Kedua, bank berposisi sebagai mudharib karena bank menerima modal dari nasabah untuk dikelola agar mendapatkan hasil yang baik. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Shahibul Maal dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syari'ah dan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah ditinjau dari asas kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, perlindungan hukum terhadap shahibul maal sebagai penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yakni perlindungan secara implisit seperti pengawasan, pembinaan, management risiko, penerapan prinsip kehati-hatian dan sebagainya serta perlindungan secara eksplisit dengan cara membentuk suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, selain itu juga melaksanakan tata kelola perbankan syariah secara (good corporate governance). Proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah dilakukan melalui tahap pengumpulan informasi sampai pelunasan pembiayaan, dengan melakukan analisis 5C yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi atau dikenal Prudential Principle. Pembiayaan mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip sistem bagi hasil dan dalam pemberian pembiayaan kepada mudharib maka shahibul maal dapat meminta jaminan kepada mudharib untuk mengantisipasi kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh mudharib dalam melaksanakan usahanya yang dapat merugikan shahibul maal serta para pihak terkait. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui jalur non litigasi seperti mediasi, musyawarah, pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional serta jalur litigasi melalui pengadilan agama.

keywords = perlindungan hukum, shahibul maal, pembiayaan, akad mudharabah

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3230>

Kekuatan hukum R n D PT Lion mentari sebagai dasar pemberian ganti rugi bagi ahli waris korban jatuhnya pesawat lion air jt-610 ditinjau dari perjanjian pengangkutan

Nadhilah Nur Zain
NIM.4011611057

Abstrak

Kegitan pengangkutan menimbulkan terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan perusahaan pengangkutan, yang disertai hak dan kewajiban. Kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 menyebabkan meninggalnya 189 penumpang, membuat pihak maskapi untuk wajib memberikan ganti kerugian kepada keluarga korban. Sayangnya, pemberian ganti kerugian ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan. Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kekuatan hukum RnDPTLion Mentari sebagai dasar pemberian ganti rugi bagi ahli waris korban jatuhnya pesawat lion air JT-610 ditinjau dari perjanjian pengangkutan dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak keluarga yang menolak menandatangani RnD. Dalam menunjang penelitian ini, teori yang digunakan adalah Asas-Asas dalam Perjanjian dan Teori Kekuatan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan PT Lion Mentari mengeluarkan RnD sebagai syarat khusus pemberian ganti kerugian adalah tidak memiliki kekuatan hukum, serta terdapat beberapa upaya hukum bagi pihak ahli waris yang menolak menandatangani RnD untuk dapat mendapatkan haknya dengan melakukan proses litigasi dan non litigasi.

keywords = kekuatan hukum, pengangkutan, perjanjian, ganti kerugian

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3231>

**Kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing desa Mapur
Kabupaten Bangka yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung**

Nasrirudin Baidowi
NIM. 4011511042

Abstrak

Setiap orang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut, seperti halnya yang terjadi dipermukiman masyarakat dusun Tuing yang ternyata ditetapkan berada dalam kawasan hutan lindung ketika adanya pemekaran provinsi dan pembentukan provinsi Bangka Belitung. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing dan proses pembebasan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing yang berada dalam kawasan hutan lindung dan mengetahui bagaimana proses pembebasan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektivitas hukum. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Hasil penelitian, untuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing, belum ada legalitas secara hukum yang dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah dikarenakan tanah mereka masih berada dalam koordinat kawasan hutan lindung dan perlunya pembebasan dari kawasan hutan lindung terlebih dahulu melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Saran penelitian sebaiknya masyarakat dusun Tuing mengajukan pembebasan dari kawasan hutan, sehingga setelah dibebaskan baru bisa melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah mereka.

keywords = kepastian hukum, hak atas tanah, kawasan hutan lindung

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3232>

**Akibat hukum pelaku usaha online terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
(studi kasus usaha online link shop)**

Niki Aprilia
NIM. 4011511043

Abstrak

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu Pekerja/buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak yang lainnya, dan Pengusaha yang mengikatkan dirinya untuk memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Persoalan mengenai upah masih banyak terjadi sampai saat ini. Pekerja/buruh yang bersedia bekerja melebihi waktu jam kerja berhak memperoleh upah lembur, namun dalam beberapa kasus salah satunya pada karyawan usaha onlinelink shop di jakarta pusat dimana upah lembur pekerja tersebut tidak dibayar. Tujuan penelitian ini, yaitu; pertama, untuk mengetahui dasar hubungan antara pelaku usaha online dan karyawannya; kedua, untuk mengetahui akibat hukum pelaku usaha online terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang, konseptual. Hasil penelitian membuktikan, bahwa; pertama, dasar hubungan pelaku usaha onlinelink shop dan karyawannya adalah hubungan yang lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja; kedua, akibat hukum pelaku usaha online yang mempekerjakan karyawannya melebihi batas waktu yang diperjanjikan yang karena kesengajaan pengusaha online link shop dan kelalaiannya tidak membayar upah lembur maka berlaku ganti rugi. Oleh karena itu, Pengusaha online link shop seharusnya memberikan upah lembur terhadap karyawannya sehingga hak dan kewajiban terpenuhi agar dapat meningkatkan kesejahteraan antara pengusaha dan karyawan demi ketertiban umum dan peraturan yang berlaku.

keywords = perjanjian, upah lembur, pekerja
link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3233>

**Kekuatan eksekutorial putusan badan arbitrase nasional Indonesia
(studi kasus putusan BANI No. 531/VII/ARB/BANI/2013)**

Nurseha
NIM. 4011611062

Abstrak

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan kekuatan eksekutorial bagi putusan. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui keabsahan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa perdata berdasarkan UU Arbitrase dan ADR; kedua untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan BANI No. 531/VII/ARB/BANI/2013 berdasarkan UU Arbitrase dan ADR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertama BANI merupakan lembaga yang sah dan memiliki kewenangan yang absolut dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR ; kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan BANI No. 531/VII/ARB?BANI/2013 telah memiliki kekuatan eksekutorial karena Sekretaris majelis Arbitrase telah menyerahkan pelaksanaan eksekusi putusan Nomor : 531/VII/ARB?BANI/2013 kepada Panitera Pengadilan Negri Pangkalpinang, sehingga pelaksanaan eksekusinya dapat dilaksanakan dengan bantuan pengadilan atau secara sukarela oleh pihak termohon. Akan tetapi, walapun putusan Nomor : 531/VII/ARB ? BANI/2013 telah di daftarkan kepada Panitera Pengadilan Negri Pangkalpinang, eksekusinya mengalami hambatan yaitu hapusnya objek prestasi karena kebijakan publik (pemerintah). Sehingga putusan tersebut tidak dapat diselekseksi (noneksekutabel)

keywords = kekuatan eksekutorial, arbitrase, putusan, badan arbitrase
nasional indonesia

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3235>

**Efektivitas hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di
bawah umur di Pengadilan Agama Pangkalpinang**

Ovi Oktavianti
NIM. 4011611064

Abstrak

Efektivitas Hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah suatu keefektifan yang diberikan Pengadilan Agama terhadap dispensasi perkawinan. Melihat efektif atau tidaknya suatu pemberian dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Efektivitas hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan dianggap berhasil dalam melaksanakan hukum. Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada kedua atau salah satu calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun. Dispensasi Perkawinan dilakukan karena adanya keadaan darurat yang mewajibkan melangsungkan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektivitas hukum dalam pemberian pemberian dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan diajukan dikarenakan kebanyakan dari pemohon telah melakukan penyimpangan yaitu telah hamil diluar nikah diakibatkan pergaulan bebas yang alami mereka. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara tersebut karena melihat berbagai sudut pandang mulai dari kemampuan dalam memberikan nafkah lahir dan batin dan secara psikis mampu melakukan apa menjadi tanggung jawab dalam perkawinan. Saran dalam penelitian ini agar orang tua dari para pemohon lebih memperhatikan anaknya dalam setiap pergaulan yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

keywords = Efektivitas hukum; pemberian dispensasi perkawinan; anak dibawah umur

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3974>

**Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis lada putih muntok
(Muntok White Pepper) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat**

Pearl Princila Manurung
NIM. 4011611066

Abstrak

Perlindungan Indikasi Geografis mempunyai potensi untuk dikembangkan di wilayah Indonesia, khususnya di Bangka Belitung dengan Lada Putih Muntok. Meskipun memiliki potensi untuk dikembangkan mengakibatkan maraknya pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok. Perlindungan Hukum bagi BP3L terhadap indikasi geografis tergolong masih lemah. Padahal BP3L adalah pihak yang mengalami kerugian secara perdata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok, serta menggali perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris, dan metode pendekatan yang digunakan adalah efektivitas dan identifikasi. Dalam menunjang penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori hak alami, teori pertukaran sosial, reward theory, incentive theory, recovery theory, dan economic growth stimulus theory, teori domeinleer, teori kepemilikan sosial. Perlindungan hukum BP3LL diteliti dengan berdasar pada prinsip perlindungan hukum karya intelektual, keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan, perlindungan ekonomi dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oplos Lada Putih Muntok dan pengambilalihan hak indikasi geografis BP3L merupakan tindakan pelanggaran indikasi geografis, dan terdapat beberapa upaya untuk melindungi BP3L dalam menangani Perbuatan Melawan Hukum, tetapi fungsi dan kepastian hukum yang diberikan melalui upaya yang ada masih memiliki banyak kelemahan jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

keywords = bp3I, indikasi geografis, pelanggaran, lada putih muntok
link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3236>

Penerapan kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat

Sinta Afriyanti
NIM. 4011611070

Abstrak

Penerapan hukum merupakan suatu perbuatan mempraktikkan peraturan-peraturan yang berisi suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, Untuk mengetahui sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat. kedua Untuk mengetahui penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertama Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat telah kuat dan sinkron antar keduanya atau tidak ditemukan pasal yang bertentangan sehingga dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut; kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat dimana untuk menjawab permasalahan yang ada pada perkawinan tidak dicatat untuk menerapkan Itsbat nikah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, dengan diketahuinya aktivitas perkawinan oleh negara maka negara dapat memberikan perlindungan hukum dan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan oleh buku nikah/ akta nikah sehingga kepastian hukum terhadap pelaku perkawinan baru dapat diperoleh apabila ada alat bukti yang bisa membuktikannya dan aktivitas keperdataan tersebut harus diketahui oleh negara.

keywords = penerapan hukum, hukum perkawinan indonesia, perkawinan tidak dicatat
link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3237>

**Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun pulau nangka
Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah (analisis surat edaran
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah nomor: 593/84/19.04.03/2016
tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria)**

Suharti
NIM. 4011511067

Abstrak

Ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dalam penelitian ini mengulas dasar hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun Pulau Nangka dan kepastian hukum penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat Dusun Pulau Nangka berdasarkan surat edaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 593/84/19.04.03/2016 tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria. Kemudian penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum sekunder dengan primer yang diperoleh dilapangan. Setelah dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 48 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah dan digantikan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa kawasan Dusun Pulau Nangka masuk kedalam kawasan permukiman dan kawasan tersebut sudah bisa dibuatkan sertifikat hak atas tanah berupa hak milik.

keywords = hukum agraria, surat edaran, kepastian hukum penguasaan hak atas tanah

link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/3240>

KUMPULAN ABSTRAK LULUSAN TAHUN 2021



Pengaturan bank tanah dalam kaitannya dengan reforma agraria

Adytia Cempaka Kasih
NIM. 4011711076

Abstrak

Lahirnya peraturan mengenai bank tanah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilatarbelakangi sebagai media pembangunan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya terkait tanah oleh pemerintah. Apabila dikaitkan dengan reforma agraria kehadiran bank tanah nantinya akan menjamin ketersediaan tanah untuk reforma agraria yakni sebesar 30% dari tanah negara yang diperuntukan kepada bank tanah. Permasalahan yang menjadikan pengaturan bank tanah dinilai tidak sejalan dengan reforma agraria yaitu dikarenakan dalam Pasal 126 menyatakan bahwa bank tanah akan menjamin ketersedian tanah demi ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan namun terdapat beberapa pasal lainnya yang dinilai cenderung menguntungkan para investor. Oleh karena pengaturan mengenai bank tanah ini masih baru dan belum jelasnya mengenai konsep bank tanah itu sendiri, maka pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep pengaturan bank tanah dalam UU Cipta Kerja dalam kaitannya dengan reforma agraria serta bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan bank tanah dalam kaitannya dengan reforma agraria. pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu konsep pengaturan bank tanah dalam UU Cipta Kerja perlu penegasan terkait pelaksanaan bank tanah. Yang mana dalam hal ini masih berlum sejalan dengan tujuan reforma agraria. Hasil yang diperoleh dari penelitian sinkronisasi hukum pengaturan bank tanah dapat dilakukannya harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang selaras dan serasi dengan tujuan bank tanah dan reforma agraria

Keywords = Pengaturan; bank tanah; reforma agraria
link skripsi = <http://repository.ubb.ac.id/5021>

Keabsahan surat kuasa dari pekerja kepada serikat pekerja lintas sektor berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja

Ahmad Adi Saputra
NIM. 4011611007

Abstrak

Keabsahan merupakan aturan hukum yang telah ada, nyata dan pasti. Surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana orang memberikan, kewenangannya kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari pekerja, oleh pekerja, untuk pekerja baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Pekerja Citra Golden Tunggal berdasarkan sektor usaha merupakan sektor Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) telah membuat surat kuasa kepada serikat pekerja sektor Niaga, jasa, bank, dan asuransi (NIBA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan surat kuasa dari pekerja kepada serikat pekerja lintas sektor berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (statue appoarh) dalam pendekatan kasus (case approacg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebasahan surat kuasa dari pekerja kepada serikat pekerja lintas sektor berdasarkan undang-undang nomor 21 tentang serikat pekerja adalah batal demi hukum karna telah melanggar syarat objektif suatu perjanjian surat kuasa.

keywords = Keabsahan, surat kuasa, pekerja, serikat pekerja
url = <http://repository.ubb.ac.id/4511>

**Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama
Pangkalpinang**

Aldi Setiawan
NIM. 4011611008

Abstrak

Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Pada tahapan proses perceraian yang dilakukan, para pihak harus mengikuti proses mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Para pihak yang melakukan mediasi pada perkara peceraian seringkali gagal menemukan kesepakatan perdamaian, melihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pangkalpinang yaitu sebesar 5.9\% dari 286 perkara yang melaksanakan proses mediasi selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan seperti keinginan kuat untuk bercerai, pengaruh mediator, serta itikad baik dari para pihak. Meskipun masih kecilnya angka keberhasilan, mediasi masih bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara peceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara dan observasi serta didukung dengan buku-buku, dan dokumen.

keywords = Mediasi; perceraian
url = <http://repository.ubb.ac.id/5288>

**Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum
(Studi Kasus di Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka)**

Almaidar Rizki Ayu
NIM. 4011711079

Abstrak

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan ini sering menimbulkan masalah di masyarakat dimana sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering disebabkan karena tidak sepakat tentang penentuan harga ganti rugi. persediaan lahan yang ada semakin terbatas. Sehingga semakin sulitnya memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan, terutama pembangunan untuk kepentingan umum. maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersebut. Kabupaten Bangka tepatnya di Jalan Batu Rusa II merupakan salah satu yang melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta bentuk dan besar ganti rugi terhadap warga pengadaan tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada tumpang tindih antara warga yang mempermasalahkan surat tanah berstatus hak milik. Simpulan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka menurut penulis proses nya sudah sesuai dengan aturan dan sudah sesuai dengan tahapan proses pengadaan tanah. Untuk masalah pembebasan lahan warga, sudah dilaksanakan semua pembebasan lahan tanah nya. Alas hak pemilikan tanah yang terkena pembangunan Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka berdominan SHM (sertifikat hak milik) dan SKT (sertifikat kepemilikan tanah) sampai camat dan pemberian bentuk ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah kepada warga yang terkena pengadaan tanah dalam bentuk uang.},

keywords = Pengadaan; Tanah; Pembangunan; Kepentingan Umum
url = <http://repository.ubb.ac.id/4943>

**Efektivitas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan di Indonesia ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Studi kasus di PT Timah Tbk.)**

Anggar Dian Tiffany

NIM. 4011711028

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) pada PT Timah. Tbk. dan bagaimana pengaruhnya dalam mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu prinsip dalam GCG adalah prinsip pertanggungjawaban (responsibility) atau corporate social responsibility (CSR), di dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas CSR dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, hal tersebut diatur dalam Pasal 74 sebagai suatu kewajiban hukum bagi perusahaan. Khususnya perusahaan yang begerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti PT Timah Tbk. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip GCG yang secara serius dilakukan oleh PT Timah Tbk telah mendorong terlaksanakannya program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mewujudkan budaya kepatuhan hukum oleh perusahaan sebagaimana diharapkan dalam Pasal 74 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

keywords = Good Corporate Governance, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
PT Timah Tbk.
url = <http://repository.ubb.ac.id/4806>

Implikasi asas itikad baik pada transaksi jual beli online

Aprilianna
NIM. 4011711002

Abstrak

Pada saat ini Indonesia tengah berada di era peralihan dari ekonomi tradisional ke era ekonomi digital seperti kegiatan jual beli online. Transaksi era tradisional menuntut para pihak yang akan bertransaksi hadir secara fisik di waktu dan tepat yang bersamaan. Berbeda dengan era digital yang transaksi secara online sehingga tidak perlu bertatap muka secara langsung tetapi hal ini menimbulkan tidak adanya itikad baik yang telah diperjanjikan. Rumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana ruang lingkup hukum jual beli secara online dan bagaimana implikasi asas itikad baik pada transaksi jual beli online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ruang lingkup hukum jual beli secara online dan mengetahui implikasi asas itikad baik pada transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perjanjian jual beli secara online tidak jauh berbeda dengan kontrak jual beli yang digunakan dalam dunia offline, perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan. Media yang dipakai pada transaksi konvensional menggunakan kertas sedangkan media yang digunakan pada transaksi online adalah jaringan internet. Asas itikad baik menghendaki agar tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kesepakatan yang terjadi pada transaksi online. Saran dalam penelitian yakni agar peraturan yang lebih tegas mengatur perjanjian jual beli secara online sehingga tidak merugikan pihak diperjanjian tersebut dan pemerintah juga berperan aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengeluarkan daftar hitam bagi pihak yang melakukan perdagangan secara online.

keywords = Perjanjian jual beli online; jual beli online; asas itikad baik
url = <http://repository.ubb.ac.id/4838>

**Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2010/PN Niaga
JKT.PST dalam kaitan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek**

Ardiansyah Jaya
NIM. 4011611014

Abstrak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan batang dan/atau jasa. Bahwa berdasarkan penjelasan didalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai permohonan dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak untuk barang dan/atau jasa sejenis. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/ Pdt. SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST. kedua, untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam upaya memberikan perlindungan hukum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam upaya penerbitan sertifikat hak merek seharusnya pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih teliti dengan adanya merek-merek yang sekiranya memiliki persamaan pada pokoknya.

Keywords = Perlindungan hukum, merek, first to file, kekuatan hukum
url = <http://repository.ubb.ac.id/4591>

Tanggung jawab penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur (studi kasus di toko bangunan Citra Sarana Material)

Bella Dwi Inanda
NIM. 4011711081

Abstrak

Suatu perjanjian yang diadakan terdapat kreditur dan debitur. Namun tidak hanya kedua belah pihak tersebut, terdapat juga pihak ketiga yang salah satunya adalah penjamin (borgtocht). Dalam hal terjadinya wanprestasi terkait perjanjian tersebut, maka penjamin sebagai pihak ketiga juga dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya pihak debitur saja. Pertanggungjawaban penjamin diatur dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu terdapat 2 permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan tanggung jawab oleh penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur, serta bagaimana upaya penyelesaian utang-piutang terhadap debitur yang melakukan wanprestasi kepada kreditur. Pada penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat perskriptif dan terapan, maka mengenai tanggung jawab penjamin (borgtocht) dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil dari penelitian ini yaitu penjamin tidak bertanggung jawab secara mutlak karena terdapat perjanjian jaminan kredit antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian utang-piutang yang bermasalah dapat dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1338 KUHPer yang berupa adanya itikad baik, serta dapat dilakukan dengan 3 tahap penyelesaian yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

keywords = Tanggung jawab; penjamin; kredit; debitur
url = <http://repository.ubb.ac.id/5087>

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan

Dayu Vandika
NIM. 4011311029

Abstrak

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia perbankan maupun keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan ketika debitur wanprestasi. Sedangkan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Metode pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan identifikasi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kreditur dapat melakukan eksekusi Jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (30), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) sebagai dasar hukum dalam melakukan eksekusi. Adapun pasal yang memperkuat kedudukan kreditur sebagai pemegang hak atas jaminan yaitu Pasal 1 angka 1 yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang hak tanggungan atau kreditur (droit de preference) dan juga Pasal 7 tentang asas droit de suite yang menjelaskan hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada.

keywords = Perlindungan hukum, perjanjian kredit, hak tanggungan
url = <http://repository.ubb.ac.id/4540>

Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang

Dilla Aprilia
NIM. 4011711033

Abstrak

Dalam penyelenggaraan angkutan udara terjadi beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya penerbangan tepat waktu. Berdasarkan terjadinya kasus keterlambatan penerbangan masih banyak pengangkut mengabaikan hak-hak penumpang, sehingga berdampak pada kerugian penumpang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kewajiban pengangkut atas terjadinya keterlambatan penerbangan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang terhadap kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Untuk meneliti hal tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif berdasarkan asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penyelenggaraan angkutan udara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkut memiliki kewajiban berupa tanggung jawab hukum akibat keterlambatan penerbangan, yaitu memberikan kejelasan informasi mengenai penundaan penerbangan, dan pemberian ganti rugi sebagaimana diatur secara khusus dalam undang-undang. Ketentuan tanggung jawab hukum akibat keterlambatan penerbangan diatur dalam Pasal 146 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delayed Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Bagi penumpang yang dirugikan dapat melaporkan keluhan kepada perusahaan penerbangan sebagai upaya pertama akibat keterlambatan penerbangan. Selain itu penumpang dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan /atau jalur di luar pengadilan.

keywords = Angkutan udara; keterlambatan penerbangan; kewajiban pengangkut
url = <http://repository.ubb.ac.id/4930>

Problematika hukum kompetensi peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan

Dini Robbi Rodliyah
NIM. 4011711034

Abstrak

Tanah sudah menjadi objek sengketa atau konflik jauh sebelum adanya peraturan yang mengatur berdasarkan asas konkordansi. Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau konflik pertanahan. Namun adanya titik singgung pada objek sengketanya kemudian dapat menimbulkan adanya dua putusan yang berbeda dari dua peradilan yang berbeda pula secara absolut atas satu sengketa atau konflik tanah yang sama seperti dalam Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG yang bertentangan dengan Putusan PN Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG, dan juga konflik pertanahan dalam Putusan PTUN Nomor 11/G.TUN/2001/P.TUN.JPR yang bertentangan dengan Putusan PN Nomor 30/Pdt.G/1995/PN. Jpr. Maka untuk meneliti permasalahan tersebut, akan ada dua rumusan permasalahan yang akan diangkat. Bagaimana problematika hukum kompetensi Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan? Bagaimana implikasi hukum problematika kompetensi Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa Peradilan Perdata lebih berkompeten menyelesaikan suatu permasalahan pertanahan secara keseluruhan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kecil kemungkinan terjadi dan dapat terjaminnya kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan ini perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kompetensi peradilan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan.

keywords = Problematika hukum; kompetensi peradilan; sengketa pertanahan
url = <http://repository.ubb.ac.id/4810>

Upaya hukum pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak

Efjuni Liensia
NIM. 4011711086

Abstrak

Upaya hukum yang dilakukan oleh pengusaha yang memutuskan hubungan kerjanya dengan pekerja yakni melakukan upaya hukum pengaduan ke dinas yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan dan pengusaha melakukan upaya hukum sebagaimana memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya hukum pengusaha ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak yakni pada studi kasus di PT Bangka Media Grafika dan untuk mengetahui keabsahannya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun pada awalnya terjadi perselisihan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan dan keabsahan pemutusan hubungan kerjanya yakni sah, karena berdasarkan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dalam penelitian ini, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena akan berdampak negatif terutama kepada pekerja.

keywords = Upaya hukum, pengusaha, pemutusan hubungan kerja
url = <http://repository.ubb.ac.id/4530>

Kedudukan lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan pada transaksi over credit perjanjian di bawah tangan (studi terhadap putusan Pn.No.3/Pdt.G/2019/PN Pgp

Farti Anisa Claudia Sinulingga

NIM. 4011711041

Abstrak

Kedudukan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing atau kreditur terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan salah satu sarana kedudukan hukum bagi hak keamanan kreditur, yakni sebagai suatu kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjaman kredit. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan transaksi over credit di bawah tangan dan mengetahui lembaga pembiayaan berhak memberikan ataupun menahan jaminan dalam tansaksi over credit. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian, bahwa kedudukan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan transaksi over credit perjanjian di bawah tangan, terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka pada kasus transaksi over credit di bawah tangan oleh debitur, jika ditinjau berdasarkan Pallsal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Serta pada penyerahan jaminan diberikan kepada debitur yang identitasnya tertera pada akta jaminan fidusia.

keywords = Kedudukan hukum; lembaga pembiayaan; perjanjian leasing
url = <http://repository.ubb.ac.id/4917>

Analisis putusan nomor 11/PDT.G/2020/PNSGL dalam kaitanya dengan menaikan biaya sewa sepihak pada perjanjian sewa kios plaza taman sari Sungailiat

Hadi Dharma Sulianto
NIM. 4011711091

Abstrak

Putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan ada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perjanjian sehingga hakim menyatakan kekeliruan dan posita gugatan para penggugat tidak ada kelasinya dengan petum yang diminta. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian terhadap perjanjian sewa kios Plaza Taman Sari Sungailiat yang dinaikan sepihak oleh PT Garba General Kontraktor. Bagaimana analisis Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PNSgl dalam kaitanya dengan menaikan biaya sewa sepihak pada perjanjian sewa kios Plaza Taman Sari Sungailiat. Dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu di bidang hukum terutama masyarakat dengan ilmu pengetahuan ini. Serta dapat menambah wawasan dan sebagai pedoman terhadap peneliti selanjutnya. Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada semua pihak dalam praktik membentuk suatu perjanjian sewa-menyeawa. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah apabila terjadi tindakan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dari tindakan PT GGK yaitu tidak tepenuhnya syarat subjektif perjanjian yaitu kesepakatan, perjanjian karena tidak terpenuhnya syarat subjektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Penggugatlah yang telah wanprestasi karena dengan sengaja melakukan keterlambatan pembayaran padahal sudah sepakat dengan addendum. Perjanjian masih mengikat selama salah satu pihak belum meminta pembatalan. Pembatalan perjanjian tidak menghilangkan akibat dari perjanjian yaitu ganti kerugian dari wanprestasi tersebut.

keywords = Putusan pengadilan; perjanjian; sewa, gugatan; wanprestasi
url = <http://repository.ubb.ac.id/4903>

Tanggung jawab keperdataan perusahaan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (studi kasus PT. Putra Tongga Samudera)

Irva Risti Widiatari
NIM. 4011711011

Abstrak

Dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, sangat diperlukan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, terutama saat menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam hal perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pertanggungjawaban terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan terjadinya kematian pada salah satu pekerja di PT. Putra Tongga Samudera harus diperhatikan dengan baik, karena pekerja yang bekerja di perusahaan tambang ini sangat rentan akan terjadinya kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini akan diketahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data, yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian PT. Putra Tongga Samudera belum bertanggungjawab secara penuh terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, dikarenakan adanya faktor penghambat bagi perusahaan dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja.

keywords = Pertanggungjawaban perdata; perusahaan; kecelakaan kerja
url = <http://repository.ubb.ac.id/4814>

Penerapan itikad baik dalam perjanjian jual beli nanas Sistem Ijon di Desa Cengkong Abang

Isdan
NIM. 4011711046

Abstrak

Jual beli merupakan kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir. Dalam Pasal 1458 KUH Perdata jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jual beli yang di terjadi di Desa Cengkong Abang merupakan jual beli yang dilakukan ketika barang yang menjadi objek jual beli dalam hal ini buah nanas sudah dibeli ketika masih hijau atau masih berada di pohonnya. Sistem jual beli seperti ini lazim disebut sistem jual beli ijon. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya itikad baik dari para pihak yang telah melakukan jual beli sistem ijona tersebut. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data diperoleh dengan wawancara secara langsung ke pihak yang melakukan transaksi atau pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian penjual yang telah melakukan perjanjian dengan pemilik lahan tidak beritikad baik dalam memberikan fakta material dari objek perjanjian sehingga membuat gambaran objek menjadi kabur. Tidak adanya itikad baik juga disebabkan oleh pembeli yang tidak memenuhi kewajiban untuk terlebih dahulu meneliti objek dari perjanjian jual beli yang dilakukan.

keywords = Perjanjian Jual Beli; Itikad Baik; Ijon
url = <http://repository.ubb.ac.id/4945>

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada praktek nomine di Indonesia (studi kasus putusan MA no. 193/PDT/2015/PT.DPS)

Jefri GK Sinaga
NIM. 4011711047

Abstrak

Nomine adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Bahwa nomine dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property atau tanah, sebagai direktur sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Praktek Nominee di Indonesia berdasarkan (Studi kasus putusan MA No.193/PDT/2015/PT.DPS) merupakan bentuk penyelesaian hukum terhadap terjadinya wanprestasi pada perjanjian nomine yang secara hukum tidak di akui keabsahannya melalui jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas nomine yang di tinjau dari hukum positif Indonesia dan penyelesaian hukum seperti apa yang dilaksanakan bila terjadi wanprestasi pada prakteknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian legalitas nomine di Indonesia, perjanjian nomine merupakan perjanjian yang tidak legal dan/atau tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yang berarti keabsahan dari perjanjian tersebut belum terealisasi dan Tanggung jawab Notaris terkait perjanjian nomine dalam Putusan MA No. 193/PDT/2015/PT.DPS yaitu dikenakan sanksi perdata yaitu mengganti kerugian dengan cara menanggung biaya perkara yang menjadi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Praktek Nominee Di Indonesia berdasarkan (Studi kasus putusan MA No.193/PDT/2015/PT.DPS)

keywords = Penyelesaian sengketa; nomine; wanprestasi
url = <http://repository.ubb.ac.id/6469>

**Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis sebagai hak komunal
masyarakat di Pulau Belitung**

Jodi Saputra
NIM. 4011711049

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis sebagai hak komunal masyarakat di Pulau Belitung yang menjadi objek sempel adalah Batu Satam dan Nanas Badau dimana belum adanya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis di Pulau Belitung hingga sampai penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum serta faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis sebagai hak komunal masyarakat di Pulau Belitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Batu Satam dan Nanas Badau serta potensi indikasi geografis lainnya di Pulau Belitung telah seharusnya didaftarkan karena telah memenuhi syarat pendaftaran indikasi geografis seperti karakteristik, kualitas dan reputasi yang membedakan dengan objek yang sama lainnya. Dalam implementasinya adanya faktor yang mempengaruhi Batu Satam dan Nanas Badau serta potensi indikasi geografis lainnya di Pulau Belitung belum mendapatkan perlindungan hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat, kurang familiarnya dengan indikasi geografis, belum diakomodirnya objek penelitian ke dalam peraturan daerah serta telah didaftarnya salah satu objek terhadap perlindungan varietas tanaman.

keywords = Perlindungan hukum; indikasi geografis; pulau Belitung
url = <http://repository.ubb.ac.id/4889>

Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional

Karina Aulia Sari
NIM. 4011711093

Abstrak

Seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu, asli tapi palsu maupun sertifikat ganda di mana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengemukakan kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan. Ini tidak lain merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam konteks pelaksanaan konsep negara hukum kesejahteraan. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dikemukakan tujuan penyelesaian sengketa Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaturan serta proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Untuk menunjang penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori pembuktian, teori penyelesaian sengketa, dan teori preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan melalui penyelesaian mediasi.

keywords = Penyelesaian sengketa; Sertifikat; Badan Pertanahan Nasional
url = <http://repository.ubb.ac.id/5019>

Pemenuhan hak alimentasi terhadap orang tua terlantar berdasarkan ranah hukum keperdataan

Leony Tania
NIM. 4011711050

Abstrak

Alimentasi adalah hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Hak alimentasi orang tua terhadap anak diatur dalam ranah hukum keperdataan yaitu Pasal 321 KUH Perdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana pemenuhan hak alimentasi terhadap orang tua terlantar berdasarkan ranah hukum keperdataan (2) Bagaimanakah akibat hukum tidak dipenuhinya hak alimentasi oleh anak pada orang tuanya. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) pemenuhan hak alimentasi terhadap orang tua terlantar, yaitu dengan menghormati, memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua yang dilakukan oleh anak .(2) akibat hukum jika anak tidak memenuhi hak alimentasi orang tua tidak diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi hukum keperdataan memberikan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi orang tua yang tidak terpenuhi hak alimentasinya.

keywords = Pemenuhan hak alimentasi; orang tua terlantar; keperdataan
url = <http://repository.ubb.ac.id/4840>

Akibat hukum larangan hak milik atas tanah pertanian secara Absentee

Nadia Feblia
NIM. 4011711100

Abstrak

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh dan dapat dipunyaai orang atas tanah, hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Larangan memiliki tanah pertanian secara absentee adalah salah satu program utama dari landreform dengan alasan kepentingan sosial dan perlindungan tanah. Masih adanya kasus mengenai tanah absentee membuktikan bahwa pemilikan tanah pertanian secara absentee masih ada sampai saat ini. Tanah pertanian harus diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga tanah tidak tertumpuk di tangan segelintir orang yang mengakibatkan para petani kekurangan lahan untuk bertani yang mana hal ini dikhawatirkan tanah-tanah tersebut dimiliki melampaui batas yang sudah ditentukan sehingga akan menjadi penghambat perkembangan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum kepemilikan tanah pertanian secara absentee dan akibat hukum pemilikan tanah pertanian secara absentee. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam menunjang penelitian ini, digunakan asas-asas hukum agraria yakni asas nasionalitas, asas landreform, dan asas fungsi sosial tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pertanian harus diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya, jika pemilik tanah bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut, jika tanah yang dimiliki melampaui batas yang telah ditentukan maka tanah akan diambil oleh negara dan akan dire distribusikan kepada yang berhak dan bekas pemilik tanah tersebut akan diberikan ganti kerugian.

Keywords = Tanah absentee; Hak Milik Atas Tanah; Undang-Undang Pokok Agraria
url = <http://repository.ubb.ac.id/5020>

Implementasi hukum terhadap pelaku pengguna karya lagu oleh usaha kafe di Pangkalpinang

Nengsi Fronika Tamba
NIM. 4011711102

Abstrak

Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta dan tergolong dalam seni. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketika pengguna atau pemilik kafe mengumumkan lagu ditempat umum wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta atau memberikan royalti atas pemanfaatan hak ekonomi. Pemilik kafe dalam praktik tidak melakukan perizinan atau bahkan tidak membayarkan royalti. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban membayar royalti dan implementasi hukum terhadap pelaku pengguna yang memanfaatkan lagu tanpa izin secara komersial di kafe Pangkalpinang. Dalam penelitian ini akan diketahui pelaksanaan kewajiban membayar royalti oleh pihak kafe, serta penerapan hukumnya terhadap pelaku yang memanfaatkan lagu tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan identifikasi dan efektivitas yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data, yang dilakukan dengan wawancara berdasarkan sampel. Berdasarkan dari hasil penelitian Pemilik kafe belum melaksanakan kewajiban membayar royalti dalam pemutaran lagu yang dilakukan, serta penerapan akan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut bagi pelaku yang memanfaatkan lagu tanpa izin belum diterapkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal penerapan tersebut ditemukan faktor penghambat bagi Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam perizinan dan pembayaran royalti dari setiap pengguna.

keywords = Implementasi hukum; pelaku pengguna; pemutaran lagu; kafe, royalti
url = <http://repository.ubb.ac.id/4817>

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kerahasiaan data transaksi pinjaman online

Reko Maulana
NIM. 4011311087

Abstrak

Transaksi pinjam meminjam uang merupakan hal yang tidak asing lagi, salah satunya yaitu transaksi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas kerahasiaan data transaksi pinjaman online serta penyelesaian perdata terhadap pelanggaran data pribadi dalam transaksi pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

keywords = Perlindungan hukum, kerahasiaan data, pinjaman online
url = <http://repository.ubb.ac.id/4570>

Sinkronisasi antara undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbiterase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang posedur mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa

Reza Algifari
NIM. 4011311091

Abstrak

Penyelesaian hukum sebagai suatu proses penyelesaian masalah baik di dalam atau diluar pengadilan tersebut. Permasalah yang minmbulkan kesalahpahaman baik dari segi perselisih, perbedaan pendapat, pertentangan dan pertengkaran diantara dua belah pihak tersebut. alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU30/1999?). Dalam Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Pihak ketiga yang menengahi harus mengerti permasalahan kedua pihak tersebut. Setelah itu, mediator selaku pihak ketiga akan memberikan solusi, di mana masing-masing pihak harus mendengar segala bentuk masukan dari Mediator, guna mempercepat penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas perkara. Kekuatan hukum menjadi salah satu alternatif meninjau penyelesaian malalah terutama diluar pengadilan tersebut. Dalam pengadilan dan di luar pengadilan, mediasi diluar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah Lembaga independent alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai pusat Mediasi Nasional. Mediasi berada di dalam pengadilan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menanganiperkaranya.

keywords = Singkronisasi, mediasi, arbitrase, kekuatan hukum dan penyelesaian diluar pengadilan
url = <http://repository.ubb.ac.id/4582>

Penerbitan surat keterangan tanah oleh lurah atas tanah dengan sertifikat ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Ria Oktaviani
NIM. 4011411086

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan mendaftarkan suatu hak milik atas tanah supaya mempunyai kekuatan hukum. Dalam pendaftaran tanah untuk menimbulkan keadaan hukum dan hak-hak baru harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh mengandung unsur kesalahan, baik menyangkut aspek teknis maupun aspek yuridis. Hal ini menyebabkan banyaknya gugatan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah melalui pengadilan, baik secara individu maupun kelompok. Ketetapan dalam pendaftaran tanah sering terjadi memuat kekurangan data yuridis dan menyebabkan ketetapan itu tidak sah. Hal ini telah terjadi ketetapan itu tidak memenuhi tujuan peraturan dasarnya (doelmatige) atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (detournement de pauvoir). Kesalahan tersebut akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga orang yang berhak atas tanah tersebut akan dirugikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum surat keterangan tanah, serta upaya hukum masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya jika terjadi penyelewengan. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris, dan metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statua aproachtau) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam menunjang penelitian ini, teori yang digunakan adalah asas akurasi pendaftaran tanah, asas keterbukaan (publisitas), teori hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat hanya sekedar menegaskan riwayat tanah, upaya yang dapat dilakukan proses mediasi dengan pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional dan mengajukan gugatan melalui pengadilan setempat apabila penyelesaian tidak tercapai.

keywords = Pendaftaran tanah; skt; kepala desa; sertifikat tanah
url = <http://repository.ubb.ac.id/5252>

Akibat hukum kesalahan dalam pencatatan akta nikah

Roby Ferdiansyah
(NIM. 4011411097)

Abstrak

Prosedur Pencatatan Akta Nikah Berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pemberitahuan Kehendak Nikah oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan; Pencegahan Pernikahan, apabila tidak terpenuhi syarat materil yaitu syarat terkait akta nikah, larangan perkawinan dan syarat administratif; Penolakan Kehendak Nikah, jika syarat tidak terpenuhi menurut hukum munakahat dan menurut undang-undang perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah wajib menolak pelaksanaan pernikahan tersebut dengan memberitahukan surat penolakannya. Unsur-unsur Yang Terdapat Dalam Akta Nikah Menurut Hukum Perkawinan Indonesia diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan spesifikasi akta nikah seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Bab XV Pasal 36. Akibat hukum kesalahan pencatatan akta nikah yaitu adanya kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, sebab akta nikah dijadikan pedoman terjadinya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administratif maupun hukum. Oleh sebab itu, adanya kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak hanya berpengaruh terhadap administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu keraguan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

keywords = Akibat hukum; pencatatan akta nikah
url = <http://repository.ubb.ac.id/5073>

Analisis hukum terhadap pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-phk dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Ruth Octavia
NIM. 4011711063

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, telah mengakomodir beberapa undang-undang menjadi satu paket yaitu, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan, serta beberapa peraturan undang-undang lainnya yang tak dapat dirinci dalam tulisan ini. Pemerintah mempunyai persepsi sendiri untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan alasan untuk perbaikan ekonomi nasional Indonesia yang semakin terpuruk, tetapi terdapat beberapa problematika terkait pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Salah satunya terkait pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK. Rumusan Masalah di Penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan pesangon kepada pekerja yang di PHK dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kedua, Bagaimana problematika pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini, Pertama, terdapat perubahan pengaturan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai uang penghargaan, dan uang penggantian hak, Kedua, terdapat problematika di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni terkait pengubahan pada pesangon, uang penggantian hak yang masih bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan dan teori ketenagakerjaan.

keywords = Pesangon; pekerja; pemutusan hubungan kerja; undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
url = <http://repository.ubb.ac.id/5107>

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang

Savira Nur Fajri
NIM. 4011711108

Abstrak

Salah satu upaya perlindungan hukum dibentuknya Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau, mencegah, dan mengawasi produk-produk kosmetik termasuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Namun, masih maraknya peredaran kosmetik ilegal di pasaran yang tidak memiliki nomor izin edar dan mengandung bahan-bahan berbahaya yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana upaya perlindungan hukum oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal; kedua, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, analisis data kualitatif, dan wawancara kepada pegawai BPOM, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian ini adalah; pertama, melakukan BPOM di Kota Pangkalpinang menyelenggarakan pembinaan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, melakukan pengawasan terhadap distribusi-distribusi kosmetik berdasarkan analisis risiko, dan memberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar; kedua, kurangnya sumber daya manusia dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pangkalpinang yang memadai, ketidaktahuan konsumen terhadap kosmetik ilegal, dan mudahnya akses keluar masuk kosmetik ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan gelap.

- keywords = Perlindungan hukum; konsumen; kosmetik ilegal; balai pengawas obat dan makanan
url = <http://repository.ubb.ac.id/5028>

Perbandingan hukum perkawinan silariang antara hukum adat Bugis dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Shindy Alvionita Ayros
NIM. 4011711065

Abstrak

Perkawinan dalam hukum adat haruslah dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, silariang (kawin lari) merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan cara kabur bersama karena suka sama suka dan melakukan prosesi pernikahan tanpa upacara adat Bugis dan persetujuan keluarga atau wali dari pihak perempuan. Oleh karena itu, terdapat 2 permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana perbandingan hukum perkawinan silariang antara hukum Bugis dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagaimana akibat hukum perkawinan silariang antara hukum adat Bugis dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada penelitian normatif ini, maka mengenai perkawinan silariang dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah terkait dan Hukum Adat Bugis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin silariang dalam hukum adat Bugis tidak diperbolehkan dan sangat dilarang, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kawin silariang tidak dilarang karena tidak ada aturan mengenai hal itu. Kemudian mengenai akibat hukumnya, kawin silariang dalam hukum adat Bugis mengakibatkan timbulnya sanksi adat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada aturan mengenai kawin lari maka tidak ada akibat hukum yang timbul selama perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama.

keywords = Perkawinan; silarian; hukum adat; undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
url = <http://repository.ubb.ac.id/4914>

Pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi covid-19

Sri Devi Natalia
NIM.4011711066

Abstrak

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi. Kemudian oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional yang menyebabkan segala aspek kegiatan terganggu salah satunya kegiatan pemenuhan kewajiban utang-piutang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundangan-undangan yang dianalisis dengan metode kualitatif mengangkat dua permasalahan yaitu, bagaimana pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dengan menetapkan perjanjian utang-piutang dalam keadaan overmacht. Klasifikasi overmacht yang berkaitan dengan keadaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dikategorikan dalam keadaan overmacht subjektif, overmacht relatif, overmacht temporer, serta overmacht impracticability dan pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 tetap dapat dilaksanakan. Berlandaskan pada peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Hasil dalam penelitian pemenuhan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan mengadakan kesepakatan baru antara para pihak, dengan melakukan penundaan pembayaran, perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran dan mengurangi nominal pembayaran.

keywords = Perjanjian, Utang-Piutang , Kewajiban, Covid-19
url = <http://repository.ubb.ac.id/4902>

**Implikasi hukum perjanjian baku (klausula eksonerasi) dalam perjanjian kredit
Leasing kendaraan bermotor**

Surya Jaya
NIM. 4011711068

Abstrak

Perjanjian baku merupakan salah satu perjanjian yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Penerapan perjanjian baku tersebut sejak awal kehadirannya hingga sekarang masih menimbulkan beberapa kontroversi. Dalam perjanjian baku dikenal dengan adanya klausula eksonerasi yang muncul sebagai klausula yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi beban tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui serta menganalisis mengenai keabsahan perjanjian baku, kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, serta implikasi hukum perjanjian baku dalam kredit leasing kendaraan bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian baku tetap sah dan tetap berlaku, serta implikasi hukum pada perjanjian baku kredit leasing pada kendaraan bermotor masih belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku padahal sudah terdapat undang-undang yang mengatur jelas mengenai pencantuman klausula eksonerasi yang dilarang yang dapat ditemukan di Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 2009.

keywords = Implikasi hukum; perjanjian baku; klausula eksonerasi; kredit; leasing;
kendaraan bermotor
url = <http://repository.ubb.ac.id/4926>

**Prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di kota
Pangkalpinang**

Yessi Erika
NIM. 4011711116

Abstrak

Di dalam penerbitan sertifikat sering muncul gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan karena Kantor Pertanahan di dalam melakukan tugasnya terkait pendaftaran tanah sering kali tidak cermat dan berhati-hati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji penerapan dari prinsip kehati-hatian hak atas tanah di Kota Pangkalpinang dan akibat hukumnya jika tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian yang menyebabkan munculnya sertifikat yang mengalami cacat hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber dan jenis data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan Wawancara, data dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam hal penerbitan sertifikat tanah di Kota Pangkalpinang dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah masih belum dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan hukumnya terbukti dengan masih banyaknya gugatan yang masuk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, seperti contoh kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN. Pgp, selain itu tidak adanya itikad baik dari Pemohon dalam hal masalah penunjukan mengenai lokasi, batas-batas tanah maupun luas tanahnya. Sedangkan masalah sertifikat yang cacat hukum akibat hukumnya yaitu dapat dimohonkan pembatalan terhadap sertifikat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang ataupun ke Kepala Kantor Pertanahan untuk meneruskan permohonan pembatalan yang sudah memenuhi persyaratan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang disertai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sehingga dapat dikeluarkan Surat Keputusan pembatalan sertifikat hak atas tanah.

keywords = Prinsip kehati-hatian; sertifikat; hak atas tanah
url = <http://repository.ubb.ac.id/5082>

**Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan
Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian**

Yuliantika Caesaria
NIM. 4011711075

Abstrak

Koperasi merupakan usaha ekonomi yang mendahulukan kesejahteraan anggotanya melalui bidang keuangan. Koperasi memiliki banyak jenis usaha salah satunya koperasi simpan pinjam, koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya dan tertuang dalam bentuk perjanjian kredit dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pada koperasi sering kali menimbulkan sengketa yaitu wanprestasi. Dasar hukum perjanjian kredit simpan pinjam ini terdapat pada KUH Perdata, Undang-Undang Perkoperasian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganlisa penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan koperasi simpan pinjam? (2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit masih tetap berpacu pada KUH Perdata dan KUHA Perdata, terutama pada Pasal 1338 KUH Perdata karena didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit.

keywords = Penyelesaian sengketa; perjanjian, kredit; wanprestasi
url = <http://repository.ubb.ac.id/4915>

Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara setelah pembentukan holding company di Indonesia

Zissi Maharesy
NIM. 4011711025

Abstrak

Suatu perusahaan dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah karena lebih dari lima puluh persen saham pada perusahaan tersebut dimiliki oleh negara. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN. Salah satunya adalah pembentukan holding company BUMN yang merupakan wujud pelaksanaan dari restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus dalam hukum positif di Indonesia mengenai konsep holding company BUMN. Pada penelitian normatif ini maka konsep holding BUMN dapat ditinjau dari beberapa peraturan yang berkaitan seperti Undang- undang Perseroan Terbatas, Undang-undang BUMN, serta Peraturan Pemerintah yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN yang menjadi anak perusahaan BUMN lain setelah pembentukan holding company tidak berbentuk persero lagi disebabkan kepemilikan saham oleh negara sebelumnya beralih kepada BUMN yang menjadi induk perusahaan. Hal ini menyebabkan hilangnya pengendalian pemerintah atas perusahaan tersebut. Namun pemerintah membuat kebijakan hak istimewa terhadap pengendalian BUMN yang menjadi anak perusahaan dengan kepemilikan Saham Dwiwarna.

keywords = Perusahaan, badan usaha milik negara, holding company
url = <http://repository.ubb.ac.id/4572>

KUMPULAN ABSTRAK LULUSAN TAHUN 2022

**Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak
berdasarkan kecakapan orang tua
(analisis putusan nomor 3/Pdt.G/2019/PNSdk tentang gugatan perceraian**

Ahmad Salim Rais
NIM. 4011711078

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 3/Pdt.G/2019/PNSdk tentang Gugatan Perceraian hakim memutuskan untuk mengabulkan petitum gugatan dari pemohon untuk melakukan perceraian. Dalam pokok perkaranya memperebutkan hak asuh anak yang telah berumur 2 (dua) tahun. Hakim dalam putusan tersebut memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibunya, sedangkan Ibu dan anak tidak tau keberadaannya sampai keluarnya putusan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui syarat perceraian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dan biaya pendidikan, biaya pengasuhan, dan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PNSdk tentang Gugatan Perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah keputusan hakim untuk memberikan Putusan Perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tepat sesuai dengan alasan yang tertera pada Pasal 19 huruf f Undang-Undang Perkawinan serta hubungan perkawinan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan damai bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai persidangan selesai, sedangkan terkait hak asuh anak yang mana dalam putusan diberikan kepada pihak tergugat atau ibu pertimbangan tidak signifikan yang mendasari hakim dalam penjatuhan hak asuh anak dengan tidak diketahui keberadaan tergugat.

keywords = Putusnya perkawinan; perceraian; hak asuh anak
url = <http://repository.ubb.ac.id/6359>

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah BUMN yang mengalami penggabungan (merger)

Ainurnisa Handayani

NIM. 4011811062

Abstrak

Penggabungan (Merger) merupakan salah satu kegiatan yang terjadi dalam dunia perbankan, merger pada umumnya dilakukan untuk menyelamatkan bank dari keadaan sulit, termasuk dalam mengembangkan kinerja maupun keuntungan dari bank tersebut. Adapun merger bank syariah BUMN yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah menjadi satu bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia membutuhkan penanganan yang serius, terutama terhadap dana simpanan milik nasabah penyimpan dana. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah yang mengalami merger tidak diaturnya ketentuan tersebut pada Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, Akuisisi Bank, sehingga adanya kekosongan hukum. Yang dimana para nasabah merasa khawatir akan dananya dibank syariah BUMN yang mengalami merger. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah BUMN yang mengalami merger beserta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan analitis. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah BUMN yang mengalami merger dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung. Adapun menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit, serta adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan milik nasabah penyimpan dana dalam merger bank syariah. Adapun akibat hukum terhadap nasabah bank syariah BUMN terutama nasabah penyimpan dana dalam merger bank syariah BUMN yaitu adanya suatu peralihan secara yuridis semua dana simpanan milik nasabah penyimpan dana dari bank syariah BUMN yang menggabungkan diri, kedalam bank syariah hasil merger yaitu Bank Syariah Indonesia, yang dimana nasabah tersebut tidak dirugikan.

keywords = Perlindungan hukum; nasabah bank syariah; merger
url = <http://repository.ubb.ac.id/5985>

Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang (studi kasus putusan nomor 17/PDT.G/2021/PN. PGP) tentang perbuatan melawan hukum

Alfia Nuriyani
NIM. 4011811002

Abstrak

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan mediator hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia serta proses pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang terkhusus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Pgp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan seorang mediator dalam hukum acara perdata di Indonesia serta pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Pgp apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yaitu Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Pgp. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan seorang mediator hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah independen, netral dan tidak memihak agar menghasilkan suatu kesepakatan damai dan pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Pgp ini dilakukan oleh seorang mediator hakim dijalankan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

keywords = Mediasi; mediator hakim; perkara perdata
url = <http://repository.ubb.ac.id/6105>

Analisis hukum penggunaan bitcoin sebagai objek perjanjian di tinjau dari syarat sah perjanjian

Alifya Vidhiannisa
NIM. 4011811027

Abstrak

Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penggunaan bitcoin sebagai objek perjanjian apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian serta akibat hukum yang terjadi jika penggunaan bitcoin sebagai objek perjanjian bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Penelitian ini bertujuan agar setiap orang mengetahui keabsahan penggunaan bitcoin sebagai objek perjanjian dalam syarat sah perjanjian serta akibat hukum yang terjadi apabila hal tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (legal approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach) serta dengan menggunakan metode eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bitcoin sebagai objek perjanjian memiliki dua akibat, yakni sah apabila digunakan sebagai objek perjanjian jual beli dalam bursa berjangka yang telah diatur oleh BAPPEBTI dan tidak sah apabila digunakan sebagai alat pembayaran yang setara dengan uang karena melanggar peraturan pemerintah tentang mata uang karena yang digunakan di Indonesia hanya rupiah. Kemudian apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian maka perjanjian itu memiliki dua akibat yakni dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

keywords = Perjanjian; bitcoin; syarat sah perjanjian
url = <http://repository.ubb.ac.id/6119>

**Analisis yuridis kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia perspektif
kepastian hukum
(studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 18/Puu-Xvii/2019)**

Anggun Rotami
NIM. 4011811029

Abstrak

Pada tanggal 6 Januari Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa frasa kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada pasal 15 Ayat (2) dan 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945. Norma yang termuat dalam pasal tersebut menimbulkan kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh kreditur yang dikatakan inkonstitusional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan mekanisme eksekusinya pasca lahirnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca lahirnya putusan MK tersebut adalah sertifikat jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ada kesepakatan cidera janji antara debitur dan kreditur, kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Kedua, mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan MK tersebut yakni dengan fiat eksekusi dan parate eksekusi. Saran, eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu ditopang oleh instrument hukum berupa UU atau peraturan setingkat sebagai terjemahan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia hasil judicial review.

keywords = Kekuatan eksekutorial; jaminan fidusia; kepastian hukum; putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019
url = <http://repository.ubb.ac.id/6103>

Ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata

Apni Mayanti
NIM. 4011811031

Abstrak

Dalam KUHPerdata konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur dalam satu generik yaitu perikatan, sehingga dalam penerapannya sering dipersamakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Padahal keduanya berbeda yaitu wanprestasi bersumber dari perikatan yang lahir karena perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari perikatan yang lahir karena undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, namun kreditur tidak hanya dapat menuntut ganti rugi semata, melainkan juga dapat berupa pemenuhan persetujuan atau pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267 KUHPerdata). Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum berupa uang, pengembalian kepada keadaan semula, larangan mengulangi perbuatannya, larangan melakukan perbuatan tertentu, dan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum. KUHPerdata tidak mengatur secara lengkap mengenai bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, sehingga digunakan aturan ganti rugi akibat wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata secara analogi dan berdasarkan pada subjektivitas hakim.

keywords = Perikatan; ganti rugi; wanprestasi; perbuatan melawan hukum
url = <http://repository.ubb.ac.id/5976>

**Problematika prinsip syirkah al-mudharabah di bank Sumsel Syariah cabang
Pangkalpinang**

Ardea Pradana
NIM. 4011711030

Abstrak

Perbankan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk perbankan syariah yang merupakan pengkredit yang menerapkan prinsip Islam. Sebagai perbankan yang menerapkan prinsip hukum ekonomi Islam, perbankan syariah harus menghindari riba dalam praktiknya, karena riba sangat bertentangan dengan dasar hukum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui konsep syirkah dalam akad mudharabah pada perbankan syariah, dan 2) Mengetahui cara penyelesaian problematika yang terjadi dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang bersifat studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prinsip syirkah pada akad mudharabah juga harus adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga masing-masing dari kedua belah pihak harus menyetujui isi dari perjanjian yang disepakati tersebut. Konsep syirkah dalam akad mudharabah bisa diterapkan secara fleksibel. Hal itu tampak mencolok pada jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang , dan 2) Penyelesaian problematika akad mudharabah yang terjadi dengan prinsip hukum ekonomi Islam dalam perbankan syariah, merupakan proses penyelesaian sengketa yang dimana memiliki beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu secara litigasi dan non litigasi. dilihat dari kompleksitas dan fleksibilitas konsep syirkah secara umum maupun akad mudharabah secara keseluruhan dalam suatu kesatuan prinsip syirkah akad mudharabah dalam hukum ekonomi Islam tidak adanya lembaga peradilan yang sampai saat ini memiliki keleluasaan yang bisa menangani kompleksitas dari segi aturan yang masih terpecah-pecah dari berbagai sumber dan fleksibilitas dari metode akad itu sendiri hingga dengan aktivitas perbankan syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi Islam.

keywords = syirkah; akad mudharabah;prinsip hukum ekonomi islam; perbankan syariah
url = <http://repository.ubb.ac.id/6273/>

Konsekuensi yuridis pernikahan siri di Indonesia

Cendy Cenora
NIM. 4011811034

Abstrak

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah di mata agama. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak luar kawin sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini, akan membahas terkait kedudukan anak kawin siri serta bagaimana perlindungan keperdataan anak tersebut. Tujuan supaya masyarakat mengerti akibat dari perkawinan siri. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Dan hasilnya adalah anak luar kawin hanya memiliki kedudukan atau hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan anak luar kawin tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda karena tidak memiliki akta kelahiran dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat menuntut haknya kepada ayah biologisnya.

keywords = Perkawinan siri; kedudukan anak; perlindungan hukum
url = <http://repository.ubb.ac.id/6082/>

**Kewajiban orang tua disabilitas dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak
berdasarkan ranah Hukum Keperdataan**

Claranda Monika
NIM. 4011811035

Abstrak

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 298 KUHPerdata dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana kewajiban orang tua disabilitas dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak dalam ranah keperdataan? (2) bagaimana akibat hukum tidak dipenuhinya hak pemeliharaan anak oleh orang tua disabilitas?. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) kewajiban orang tua disabilitas dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak dalam ranah keperdataan adalah sama dengan orang tua pada umumnya. Dimana sesuai Pasal 298 KUHPerdata dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan orang tua disabilitas wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur dan belum kawin. (2) Akibat hukum tidak dipenuhinya hak pemeliharaan anak oleh orang tua disabilitas adalah maka kekuasaan orang tua disabilitas tersebut dapat dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain (saudara kandung yang telah dewasa, keluarga anak dalam garis lurus keatas, atau pejabat yang berwenang) dengan keputusan pengadilan.

keywords = Orang tua disabilitas; pemeliharaan anak; keperdataan
url = <http://repository.ubb.ac.id/6083/>

Pembatalan waralaba (franchise) berdasarkan asas hukum perjanjian (studi putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 837/PDT.G/2021/PN.SBY)

Deska Ramadaniati
NIM. 4011811036

Abstrak

Waralaba (franchise) merupakan sebuah bentuk perjanjian yang memuat metode pemasaran dan pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Pada pelaksanaannya, sering terjadi sengketa antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Contohnya yang terjadi pada Fenty Fransisca sebagai penerima waralaba dengan Shienny Octavia dan Erwin Gunawan Wijaya sebagai pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar. Pada sengketa tersebut Fenty selaku penerima waralaba menggugat Shienny dan Erwin sebagai pemberi waralaba atas dasar prosedural perjanjian tersebut yang tidak sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba, kemudian oleh hakim gugatan tersebut diterima sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pembatalan perjanjian waralaba (franchise) dalam melindungi hak dan kewajiban dan untuk mengetahui pembatalan waralaba (franchise) dalam putusan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby berdasarkan asas umum perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mengenai pembatalan perjanjian waralaba hanya berpedoman pada KUHPerdata, belum diatur secara rinci terkait pembatalan perjanjian pada PP Nomor 42 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2008 yang mana merupakan peraturan hukum yang mendampingi pelaksanaan dari waralaba.

keywords = Waralaba (franchise); perjanjian; perlindungan hukum
url = <http://repository.ubb.ac.id/6265>

Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan

Dwi Ulfiani Saputri
NIM. 4011811071

Abstrak

Anak di luar kawin hingga saat ini masih belum mempunyai aturan hukum yang jelas, bahkan dalam UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian anak di luar kawin serta hak-hak yang harus di perolehnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mendekripsikan asas keadilan terhadap pembatasan hak-hak anak di luar kawin dan perlindungan hukum dalam memperoleh hak pemeliharaan dan kejesahteraan. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Asas dan teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah asas keadilan dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum terhadap hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan anak di luar kawin nyatanya tidak sesuai dengan asas keadilan, hal itu dikarenakan pembatasan hak dapat merugikan hak konstitusional anak di luar kawin dan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dengan sarana perlindungan hukum preventif berdasarkan KUH Perdata Pasal 867, UU Perlindungan Anak Pasal 7, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26, UU Kesejahteraan anak Pasal 2 ayat (1) Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Perlindungan Hukum represif dengan melakukan pengakuan secara sukarela dan paksaan serta dengan penetapan pengadilan berdasarkan pertibangan-pertimbangan aturan hukum yang mengatur terkait hak-hak yang harus di dapatkan anak di luar perkawinan dari orang tua biologisnya.

keywords = Anak Luar Kawin; Hak Pemeliharaan; Kesejahteraan
url = <http://repository.ubb.ac.id/5877/>

Kekuatan pembuktian surat elektronik sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 300 K/PDT/2010)

Esti Novianti
NIM. 4011811075

Abstrak

Penggunaan surat elektronik pada perkembangan era globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti tulisan/surat sehingga semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti dan untuk mengetahui kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 300 K/PDT/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu di buat, apabila dokumen elektronik tersebut hanya berisi informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk surat biasa atau akta di bawah tangan karena di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

keywords = Kekuatan pembuktian; surat elektronik; perkara perdata
url = <http://repository.ubb.ac.id/6223/>

**Problematika pengaturan jabatan rangkap komisaris BUMN ditinjau dari
pendekatan Rule Of Reason dalam larangan praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat**

Ferlisa Fanisda
NIM.4011811037

Abstrak

Persaingan di dalam pasar dalam kaitannya dengan kegiatan berusaha menjadi hal yang sudah biasa bagi setiap pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan jabatan rangkap Komisaris BUMN diatur larangannya dalam Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha), namun di beberapa aturan lain terdapat kebolehan untuk merangkap jabatan. Oleh karenanya terdapat inkonsistensi aturan terkait jabatan rangkap Komisaris dan akibat hukum yang timbul dari jabatan rangkap tersebut perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan rule of reason. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah problematika pengaturan jabatan rangkap oleh Komisaris BUMN dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? Kedua, bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari tindakan jabatan rangkap yang dilakukan oleh Komisaris BUMN ditinjau dari pendekatan rule of reason? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Dan hasil dari penelitian ini pertama, bahwa terdapat inkonsistensi antar satu peraturan dengan peraturan lain terkait jabatan rangkap oleh Komisaris BUMN di Indonesia. Kedua, bahwa jabatan rangkap yang dilakukan oleh Komisaris BUMN secara horizontal, vertikal, ataupun konglomerasi berpotensi berdampak negatif terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia.

keywords = Jabatan Rangkap; Komisaris BUMN; Hukum Persaingan Usaha
url = <http://repository.ubb.ac.id/5756/>

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology

Iranti Lamtiar Purba
NIM. 4011811038

Abstrak

Dalam pengaturan kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology, ternyata perjanjian hanya terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana pihak penyelenggara tidak termasuk dalam hubungan hukum tersebut. Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, pemberi pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara. Hal ini jelas sudah bertentangan dengan Pasal 37 POJK No 77/POJK.01/2016. Belum ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antar pihak dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology; kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: pertama, bahwa yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online berbasis financial technology ini adalah pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana pihak penyelenggara hanya sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman serta melakukan analisis, menilai kelayakan dan menyetujui calon penerima pinjaman; kedua perlunya suatu perlindungan hukum yang didapatkan kreditur selaku pihak pemberi pinjaman atas kerugian yang terjadi karena gagal bayar yang dilakukan penerima pinjaman baik dengan melakukan perlindungan preventif dan represif agar pihak kreditur mendapatkan perlindungan hukum.

keywords = Perlindungan hukum; pinjam meminjam; financial technology
url = <http://repository.ubb.ac.id/5986>

**Force Majeure sebagai dasar pemutusan hubungan kerja selama pandemi covid-19
di Indonesia**

Lintang Tirta
NIM. 4011811081

Abstrak

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan alasan force majeure selama pandemi Covid-19 di Indonesia serta akibat hukum yang dapat dilakukan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan agar setiap orang mengetahui keabsahan pemutusan hubungan kerja karena force majeure selama pandemi Covid-19 serta tindakan hukum yang dapat dilakukan pekerja yang terdampak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (legal approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi Covid-19, namun untuk lebih lanjutnya pandemi Covid-19 harus dilihat secara case by case dengan perjanjian-perjanjian dari masing-masing perusahaan antara pekerja dan perusahaan. Akibat hukum force majeure yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja adalah ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

keywords = Force Majuere; Pemutusan Hubungan Kerja; Pandemi Covid-19
url = <http://repository.ubb.ac.id/5880/>

**Penyelesaian sengketa pemutusan kontrak kerja antara atlet e-sport dengan
manajemen tim**

M.Rafli Mustofa
NIM. 4011811039

Abstrak

Permasalahan hubungan kerja di Indonesia, tidak hanya terjadi pada lingkup pemerintahan dan perusahaan saja. Hal ini juga bisa terjadi pada lingkup keolahragaan terutama antara atlet dengan pihak manajemen. Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Atlet E-Sport dengan pihak Manajemen Tim, dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk penyelesaian sengketa dan prosedur yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa antara atlet dan pihak manajemen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana problematika hukum dalam pemutusan kontrak kerja antara atlet E-Sport dengan Manajemen Tim, dan bagaimana penyelesaian sengketa pemutusan kontrak kerja secara sepikah antara atlet E-Sport dengan Manajemen Tim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan PBESI belum maksimal dalam hal perlindungan hukum kepada atlet E-Sport yang tergabung dalam keanggotaanya. Tidak semua permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Atlet E-Sport diterima oleh PBESI yang artinya perlindungan hukum yang diberikan PBESI terkesan kabur dan tidak konsisten. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan 2 pendekatan, yang diantaranya : Right Based dan Interest Based.

keywords = Penyelesaian sengketa; hubungan kerja; tim e-sport
url = <http://repository.ubb.ac.id/6241>

**Wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang secara lisan dalam konstruksi
hukum perdata dikaitkan dengan pembuktian**

Marsilia Anjeli
NIM. 4011811083

Abstrak

Masalah utang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perjanjian utang piutang di masyarakat sering diadakan dengan suatu kesepakatan antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir seketika itu. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahannya adalah perjanjian utang piutang yang silakukan secara lisan tanpa adanya jaminan, ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya bagaimana kreditur dapat membuktikan adanya perikatan di antara mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan serta proses pembuktian wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang secara lisan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya. Dari segi pembuktian perjanjian lisan ini sulit untuk dibuktikan oleh sebab itu sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis, terinci, tegas dan mudah dipahami.

keywords = Wanprestasi; perjanjian lisan; utang piutang; pembuktian
url = <http://repository.ubb.ac.id/6251/>

Pengalihan objek jaminan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di yamaha varia motor Belinyu

Melisa
NIM. 4011511037

Abstrak

Pengalihan objek jaminan dalam perjanjian kredit jual beli motor merupakan salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kreditur sebagai pihak yang dirugikan seharusnya mengambil tindakan yang tepat. Debitur seharusnya juga menjalani perjanjian dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalihan objek jaminan dalam perjanjian kredit sepeda motor di Yamaha Varia Motor Belinyu serta akibat hukum yang terjadi terhadap utangnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara melakukan pendekatan undang-undang dan penelitian kelapangan dengan lokasi penelitian di Yamaha Varia Motor Belinyu yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 32, Belinyu. Data diperoleh dari data primer yang bersumber dari keterangan para pihak yang bersangkutan dengan pengalihan objek jaminan perjanjian kredit, data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka, baik dokumen-dokumen tertulis maupun dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengalihan objek yang dijadikan sebagai jaminan tidak boleh dilakukan tanpa seizin dari pihak kreditur, serta akibat hukum terhadap utangnya yaitu utang tersebut masih tetap berjalan dan dibayar oleh debitur selaku yang bertanggung jawab atas perjanjian tersebut.

- keywords = Pengalihan; jaminan; perjanjian kredit; jual beli; yamaha varia motor Belinyu
url = <http://repository.ubb.ac.id/6350/>

Analisis terhadap peraturan menteri permendag RI nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dalam melindungi hak konsumen

Monica Romauli Situmeang
NIM. 4011811042

Abstrak

Pencantuman harga pada barang merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta jaminan bagi konsumen dalam memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur atas informasi harga barang. Dalam peraturan menteri ini juga diatur tentang pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui pengaturan tentang pencantuman serta pembulatan harga dalam peraturan menteri perdagangan RI Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013; kedua, untuk mengetahui pembulatan harga ditinjau dari asas keadilan dan keseimbangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kontekstual, dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: pertama, Peraturan menteri perdagangan telah mengatur tentang pembulatan harga yang boleh dilakukan pelaku usaha tetapi tidak selaras dengan undang-undang perlindungan konsumen dalam melindungi hak konsumen tentang pembulatan harga barang tersebut; kedua, dalam peraturan menteri perdagangan diatur tentang pembulatan harga yang harus dilakukan pelaku usaha yaitu sesuai dengan nominal rupiah yang beredar belum dapat dikatakan adil dan seimbang.

keywords = Peraturan menteri perdagangan; pencantuman harga; hak konsumen
url = <http://repository.ubb.ac.id/6267/>

Pembagian waris masyarakat minangkabau di kecamatan Girimaya kota Pangkalpinang ditinjau dari hukum islam hukum adat dan hukum perdata

Muhammad Fikri
NIM. 4011711098

Abstrak

Menurut hukum waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengamati daerah Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang tentang bagaimana pembagian warisan yang dilakukan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian waris pada masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip pewarisan yang digunakan pada masyarakat adat Minangkabau Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sejatinya tidak begitu mengikuti ketentuan yang diatur oleh hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat adat Minangkabau Kecamatan Girimaya dalam pembagian harta warisan mengalami sedikit perubahan dalam ketentuan hukum adat, namun perubahan tersebut tidak terlalu signifikan.

keywords = Pembagian waris; hukum waris islam; hukum adat Minangkabau; hukum perdata
url = <http://repository.ubb.ac.id/5689/>

**Perlindungan hukum karya cipta fotografi di media sosial terkait produk iklan
tanpa izin guna kepentingan komersil**

Mujuranto Sihotang
NIM. 4011711054

Abstrak

Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Umumnya, para fotografer tidak mengetahui bahwa karyanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta fotografi. Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: pertama, secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang besangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta fotografi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.

keywords = Fotografi; media sosial
url = <http://repository.ubb.ac.id/6490/>

Akibat hukum perbedaan pencantuman informasi harga pada display dengan sistem pembayaran supermarket ditinjau dari ketentuan umum dalam hukum perjanjian

Nadya Anggraini Pratiwi
NIM. 4011811045

Abstrak

Konsumen kerap dihadapkan dengan posisi yang lemah oleh pelaku usaha, termasuk perilaku pelaku usaha di bidang retail (supermarket) yang cenderung merugikan konsumen. Perilaku tersebut di antaranya pencantuman informasi harga yang tertera pada barang yang dipajang di display supermarket namun pada saat konsumen membayar harga barang tersebut berbeda dengan harga dalam sistem pembayaran. Hal ini tentu merugikan pihak konsumen, yang mana pelaku usaha tidak memberikan kepastian kepada konsumen tentang masalah harga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan hukum antara penjual dan pembeli di supermarket dalam hukum perjanjian dan bagaimana jika terjadi perbedaan informasi harga di kasir dengan sistem pembayaran di supermarket ditinjau dari ketentuan umum dalam hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terjadi akibat karena kedua belah pihak mengalami peristiwa hukum (jual beli) sehingga muncul perjanjian bagi keduanya, sehingga secara alami timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Dengan demikian, jual beli yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dapat batal demi hukum.

keywords = Akibat hukum; informasi harga; perjanjian
url = <http://repository.ubb.ac.id/6266/>

Penyelesaian kasus pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan Pangkalpinang

Nida Ayu Hasana
NIM. 4011811086

Abstrak

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum, menyediakan informasi bidang tanah, dan terciptanya tertib administrasi pertanahan. Penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menghasilkan produk permohonan yang dikluster berdasarkan kondisi bidang tanah. Kasus pertanahan pada kegiatan PTSL dijadikan kluster 2 (K2). K2 adalah bidang tanah yang memenuhi syarat dikeluarkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tetapi masih terdapat keberatan/sanggahan adanya perkara/sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus pertanahan dan upaya penyelesaiannya pada kegiatan PTS defense di Kantor Pertanahan Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah, kasus pertanahan pada kegiatan PTS defense tahun 2018-2021 di Kantor Pertanahan Pangkalpinang terdapat gugatan PMH dan tumpang tindih tanah K2 yang berpotensi masalah karena belum adanya aduan keberatan. Upaya Penanganan gugatan dilakukan dengan menghadirkan kuasa di persidangan. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia tetap memberikan peluang gugatan sekalipun bidang tanah memiliki SHAT. Upaya penyelesaian tumpang tindih diberikan surat pemberitahuan pemberhentian proses pendaftaran tanah sampai masalah selesai. Terdapat perbedaan fakta dilapangan yang membuat asas mutakhir tidak terjalankan. Pemohon tidak mengajukan pengaduan karena sudah mendapatkan SHAT, sehingga tidak memiliki dasar permasalahan yang harus diselesaikan. Sedangkan pihak Kantor Pertanahan Pangkalpinang tidak akan melakukan penyelesaian jika tidak ada pengaduan.

keywords = PTS defense; kasus pertanahan; pendaftaran tanah
url = <http://repository.ubb.ac.id/6550/>

Pemenuhan prinsip dasar triple bottom line pada pengaturan corporate social responsibility (csr) perseroan terbatas

Noviza Caresi
NIM. 4011811087

Abstrak

Triple bottom line hingga saat ini masih belum diatur di ketentuan manapun secara jelas, bahkan di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa itu triple bottom line pada corporate social responsibility. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, skripsi terdahulu, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas kepatutan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan dari beberapa peraturan yang mengatur tentang CSR tidak ada yang menyinggung perihal mekanisme pelaksanaan CSR serta terjadinya kekosongan hukum atau tidak adanya aturan yang mengatur tentang triple bottom line pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lainnya padahal banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terkait sumber daya alam sudah menerapkan konsep tersebut walaupun masih belum maksimal dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur.

keywords = Perseroan terbatas; triple bottom line; corporate social responsibility
url = <http://repository.ubb.ac.id/6211/>

Mediasi sengketa pertahanan oleh badan pertahanan nasional kabupaten Belitung

Rahayu GumiLang
NIM. 4011511047

Abstrak

Sengketa pertahanan saat ini menjadi perhatian bersama, karena peran dan manfaat serta fungsi tanah yang sangat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Banyaknya faktor timbulnya penyebab sengketa pertahanan mulai dari tumpang tindih atas kepemilikan tanah, nilai ekonomis tanah yang terus meningkat cukup tinggi, serta terjadinya sertifikat tanah ganda, dan banyak faktor penyebab lainnya. Dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah maka perlu penyelesaian sengketa tanah secara tuntas, baik melalui pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau non litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh atau dilakukan di luar pengadilan atau non litigasi melalui mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan kata mufakat atau musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak ketiga sebagai fasilitator maupun sebagai mediator. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator di kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan memperoleh data-data yang diperlukan melalui wawancara langsung. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah yang sering terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan tanah atas batas-batas tanah, serta diselesaikan dengan cara mediasi dengan proses berdasarkan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun secara petunjuk dan teknis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 bagian Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007.

keywords = Mediasi; sengketa tanah; badan pertanahan nasional
url = <http://repository.ubb.ac.id/6254/>

Kekuatan alat bukti surat pada penyelesaian sengketa kartel berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopolii dan persaingan tidak sehat

Regita Berlinda
NIM. 4011811047

Abstrak

Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung mempunyai peranan yang sangat penting. kekuatan alat bukti surat konteks hukum persaingan usaha Indonesia, kekuatan pada alat bukti tidak surat berkekuatan sama dengan alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Komisi terikat akan alat bukti surat yang sempurna. Sebagai alat bukti surat, maka kekuatan pembuktianya sudah jelas kuat dalam pembuktian. Artinya dalam hal ini alat bukti surat ialah sebagai alat bukti utama sama halnya dalam KUHPerdata. Penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan bagaimana kekuatan alat bukti surat pada penyelesaian sengketa kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta bagaimana metode pembuktian praktek dugaan kartel berdasarkan hukum acara persaingan usaha. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan disusun melalui deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan alat bukti surat memiliki kekuatan sama dengan alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Komisi terikat akan alat bukti surat yang sempurna. Persamaan tersebut dikarenakan kegiatan atau aktivitas pelaku usaha merupakan aktivitas bisnis. Aktivitas tersebut bersifat keperdataan yang sering dilakukan melalui surat-surat atau dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis, sehingga pelanggarannya pun dilakukan sangat berkaitan dengan aktivitas bisnisnya, namun berdampak pada kepentingan publik. Aktivitas bisnis tersebut seperti melakukan praktik monopolii, oligopoli, merger, persekongkolan, boikot, penetapan harga, penguasaan pasar dan lain-lain. Semuanya berdampak pada menurunnya produktivitas, kualitas, harga, efisiensi ekonomi.

keywords = Alat bukti tidak surat; kartel; persaingan usaha
url = <http://repository.ubb.ac.id/6232/>

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam pembagian warisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/Puu-Viii/2010

Renilda Filian Dini

NIM. 4011811014

Abstrak

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak waris anak luar kawin sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan juga pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukan pengakuan terebih dahulu oleh ayah kandungnya. Apabila anak luar kawin tersebut tidak diakui maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Mengenai hak waris anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan adanya pengakuan terhadap kedudukan anak luar kawin menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya selama dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayah biologisnya.

keywords = Kedudukan hukum; anak luar kawin; pewarisan; kitab undang-undang hukum perdata; putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
url = <http://repository.ubb.ac.id/6110>

Status PT. Timah Tbk setelah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero)

Ruth Syarma Apriani Sirait
NIM. 4011811094

Abstrak

PT. Timah Tbk yang sebelumnya BUMN dan sekarang menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero) setelah dilakukan holding company mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham seri B sebesar 65% yang dulunya dipegang negara menjadi dipegang oleh PT. Inalum (Persero). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status dan akibat hukum PT. Timah Tbk setelah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero). Didalam penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengakaji menggunakan peraturan, doktrin hukum, buku hukum, dan data-data hukum yang ada. Konsekuensi yang timbul dari beralihnya kepemilikan saham mayoritas ini mengakibatkan adanya perubahan terhadap status dan kedudukan PT. Timah Tbk. Sehingga PT.Timah Tbk yang telah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero) itu sudah bukan berstatus sebagai BUMN lagi. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat tetap mengontrol melalui hak istimewa atas kepemilikan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2016. Selain itu apabila terjadi kerugian maupun persoalan hukum yang lain PT Timah Tbk dengan pihak ketiga, maka PT. timah Tbk masih tetap menanggung secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuatnya dengan perusahaan lain atau pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwasannya PT. Timah Tbk menanggung resiko sendiri atas ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawab atas perbuatan hukumnya dengan pihak ketiga atau perusahaan lain hal ini berdasarkan dengan prinsip separate legal entity dan Pasal 3 ayat 1 UU PT. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa prinsip piearcing the corporate veil sebagai aturan pengecualian ini dapat digunakan apabila terbukti adanya kegiatan sesuai pasal 3 ayat 2 UU PT dan adanya pengabaian perseroan sebagai badan hukum mandiri.

keywords = PT. Timah Tbk; PT. Inalum (Persero); BUMN
url = <http://repository.ubb.ac.id/5977>

Kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap proses pengikatan kredit

Sofie Ananda
NIM. 4011811021

Abstrak

Kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap proses pengikatan kredit sangat penting dalam dunia perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam menerbitkan covernote dan mengetahui kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta tanah terhadap proses pengikatan kredit jaminan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa covernote tidak memiliki kekuatan hukum karena covernote tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah, maupun pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga covernote bukan merupakan akta autentik melainkan hanya sebatas surat keterangan. Namun pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tetap memiliki tanggung jawab dalam menerbitkan covernote karena di dalam covernote tertuang kebenaran atau fakta-fakta mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah).

keywords = Kekuatan hukum; covernote; pejabat pembuat akta tanah; perjanjian kredit; hukum jaminan
url = <http://repository.ubb.ac.id/6129/>

Perbandingan sistem suku bunga dalam gadai konvensional dan mu'nal, dalam gadai syariah

Syadid Demurian
NIM. 4011711070

Abstrak

Gadai adalah sebuah transaksi yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pada waktu tersebut gadai dilakukan dengan menggadaikan hewan ataupun baju zirah. Seiring berjalannya waktu gadai sekarang sudah berjalan dengan tidak dengan menggadaikan hewan ataupun baju zirah, tetapi menggunakan barang yang dapat dinilai materil. Gadai yang sekarang berjalan dengan dua sistem yaitu konvensional dan syariah, yang mana gadai dengan sistem konvesional memakai suku bunga sedangkan syariah menggunakan mu'nah. Penerapan munah ini sendiri dinilai belum dapat mencerminkan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku dikarenakan mengambil manfaat atas barang yang dijaminkan tersebut. Oleh karena itu, terdapat 2 permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana perbandingan antara sistem suku bunga dalam gadai konvensional dan mu'nah dalam gadai syariah, serta problematika yang terjadi dalam menjalankan mu'nah. Pada penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, maka mengenai sistem suku bunga dapat ditinjau dari Buku III Bagian 4 KUHPerdata dan Peraturan Direksi serta mu'nah dapat ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN- MUI/III/2002 dan Peraturan Direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem suku bunga yang berjalan dalam gadai konvensional sudah sesuai dari penerapan serta peraturan yang berlaku sedangkan mu'nah dalam gadai syariah masih harus dapat perhatian serius dari Dewan Syariah Nasional dikarenakan masih menimbulkan unsur riba didalamnya. Serta Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional haruslah lebih mengikat agar tidak terjadi percampuran peraturan yang berujung pada tidak terlaksananya prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

keywords = Gadai; suku bunga; mu'nah
url = <http://repository.ubb.ac.id/5644>

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (het) di kota Pangkalpinang

Thasia Avresta Jergi
NIM. 4011811055

Abstrak

Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas 3 kilogram dengan harga yang telah ditentukan. Sejak pemberlakuan kebijakan konversi tersebut LPG 3 Kg menjadi kebutuhan pokok yang dicari dikarenakan harga yang lebih murah. Permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat ialah timbulnya kecurangan antara hubungan konsumen dengan pelaku usaha, seperti pelaku usaha yang menjual LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi, dan itu melanggar hak-hak konsumen serta ketentuan yang ditetapkan oleh UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi di Kota Pangkalpinang beserta upaya-upaya yang dapat dilakukannya. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan undang-undang, dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha yang melakukan penjualan LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi melanggar beberapa hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen LPG 3 Kg di Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat melakukan upaya seperti melaporkan tindakan tersebut ke instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga konsumen dapat meminta perlindungan kepada pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka.

keywords = Perlindungan hukum; konsumen; pelaku usaha; liquified petroleum gas (LPG) 3 kg}
url = <http://repository.ubb.ac.id/6102>

**Keabsahan hukum peralihan hak objek kredit pemilikan rumah (take over KPR)
dengan perjanjian jual beli di bawah tangan**

Valentin Oktaviani
NIM. 4011811026

Abstrak

Peralihan hak objek Kredit Pemilikan Rumah dengan perjanjian jual beli di bawah tangan merupakan tindakan secara sepahak oleh debitur untuk mengalihkan objek utang berupa rumah kepada pihak lain tanpa sepengertahan kreditur. Peralihan utang debitur ini dalam ilmu hukum dikenal dengan pembaharuan utang atau novasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur serta akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan hak objek Kredit Pemilikan Rumah dengan perjanjian jual beli di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum peralihan utang debitur diatur dalam ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata sebagai novasi subjektif pasif dan mengenai peralihan objek berupa rumah dan tanah Kredit Pemilikan Rumah mensyaratkan harus dibuktikan dengan akta PPAT sesuai dengan Pasal 16 UUHT dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga peralihan yang dilakukan dengan cara di bawah tangan mengakibatkan Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya berdasarkan Pasal 7 UUHT. Akibat hukum dari peralihan hak objek Kredit Pemilikan Rumah yang dilakukan tanpa sepengertahan kreditur adalah berlakunya perikatan hukum yang lama antara debitur awal dengan kreditur. Peralihan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai sertifikat kepemilikan bagi debitur yang menerima pengalihan.

keywords = Pengalihan utang; kredit pemilikan rumah; perjanjian jual beli di bawah tangan
url = <http://repository.ubb.ac.id/6084>

Tanggung jawab perdata pelaku usaha penjualan obat kadaluarsa terhadap konsumen di Kota Pangkalpinang

Veni Rosalina
NIM.4011811056

Abstrak

Permasalahan hukum di Indonesia hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan manusia dan masyarakat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Di bidang kesehatan khususnya penjualan sediaan farmasi berupa obat kadaluarsa tidak dapat dipungkiri masih kerap kali kita temui. Padahal, bidang ini dapat dikatakan sebagai bidang yang sangat vital dan menyangkut nyawa seseorang karena apabila obat tidak dikonsumsi sesuai dengan dosis atau takaran bisa menjadi racun bagi tubuh. Apalagi jika obat tersebut sudah kadaluarsa atau melebihi Expired Date (ED). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata pelaku usaha penjualan obat kadaluarsa terhadap konsumen di Kota Pangkalpinang beserta akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, yang di mana dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata pelaku usaha penjualan obat kadaluarsa terhadap konsumen di Kota Pangkalpinang yaitu berupa tanggungjawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga wajibkan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ganti kerugian pada permasalahan ini bukan ganti rugi secara material atau uang tetapi lebih ke penggantian obat yang baru dan ganti rugi secara moril yang bisa menggantikan kesalahan dari si pelaku usaha ke konsumen. Tanggung jawab perdata pelaku usaha penjualan obat kadaluarsa di Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukumnya yaitu berupa sanksi akibat melakukan perbuatan melawan hukum, seperti ganti rugi, kompensasi bahkan penutupan tempat usaha, dan bisa dituntut di muka pengadilan baik dituntut karena melakukan perbuatan pidana maupun digugat karena kerugian perdata.

keywords = Tanggung Jawab Perdata; Pelaku Usaha; Obat Kadaluarsa
url = <http://repository.ubb.ac.id/5878>

Dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak (studi penetapan pengadilan agama Tanjungpandan nomor 82/Pdt.P/2021/Pa.Tdn tentang permohonan dispensasi kawin)

Windah Nurfatimah
NIM. 4011811058

Abstrak

Polemik perkawinan di Indonesia masih menjadi sorotan tajam bagi para penegak hukum terutama pada perkara dispensasi kawin, pasalnya pengaturan pemberian dispensasi kawin di tengah masyarakat yang juga bertentangan dengan pengaturan perlindungan anak sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasca revisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian dispensasi kawin sudah mencerminkan perlindungan anak dengan baik dan berbagai dampak negatif apabila anak melakukan perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur senyatanya telah melanggar kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan anak dan bukan merupakan jalan keluar, karena pada banyak kasus di lapangan pemberian dispensasi kawin hanya guna menutupi aib anak yang sudah melakukan zina padahal dibalik itu banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi kawin sebaiknya pengaturan mengenai alasan mendesak dan bukti pendukung dalam pengajuan dispensasi kawin ini lebih konkret mengingat hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang perlindungan anak serta pengaturan lain dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Hakim sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini sebaiknya lebih terbatas dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan dini mengingat dampak bagi kelangsungan hidup anak dan hak-hak anak yang dilanggar pasca terjadinya perkawinan.

keywords = Dispensasi kawin; hukum perkawinan; perlindungan anak
url = <http://repository.ubb.ac.id/6136/>

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pembeli

Yoga Triansyah
NIM. 4011811102

Abstrak

Akhir-akhir ini sering terjadi transaksi jual beli yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pembeli. Sejak saat itu orang tua anak kadang tidak memperhatikan dan tidak ada penyelesaian dalam sebuah transaksi yang dilakukan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua tersebut sehingga membuat orang tua anak tidak terima saat mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut dan menimbulkan permasalahan akibat kelalaian orang tua terhadap anak. Penelitian ini berfokus pada perlindungan para pihak transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pembeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi kepada pelaku usaha yang terlibat transaksi jual beli agar lebih memperhatikan para konsumen apakah konsumen tersebut memenuhi syarat hukum perjanjian dalam melakukan transaksi agar pelaku usaha mengetahui keabsahan hukum dalam transaksi jual beli yang dapat menimbulkan permasalahan dalam suatu transaksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan bahan hukum, bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas perlindungan pelaku usaha dan hak-hak pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mengetahui keabsahan jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai konsumen dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dari pelaku usaha maupun konsumen.

keywords = Perlindungan hukum; jual beli; anak sebagai pembeli
url = <http://repository.ubb.ac.id/6385/>

Wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah pada lembaga perbankan syariah

Yozinandika
NIM. 4011711074

Abstrak

Terbentuknya hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang terjadi dalam akad murabahah ternyata masih menyisakan persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa di dalamnya. Dalam pelaksanaan akad murabahah, tidak jarang debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya. Permasalahan bermula dari debitur yang telat membayar sehingga tidak mampu memenuhi prestasinya untuk melunasi sisa hutangnya lalu debitur itu menghindar ketika pihak bank syariah berusaha melakukan penagihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa unsur wanprestasi yang ada di dalam akad pembiayaan murabahah serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa seperti apa yang dilakukan oleh pihak bank syariah agar terhindar dari kerugian akibat dari nasabah yang wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan narasumber sebagai data. Nasabah yang tidak melakukan pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena tidak maksimalnya analisis resiko yang dilakukan oleh pihak bank syariah terhadap calon nasabah. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank syariah dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi cenderung mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah dengan nasabah yang wanprestasi. Selain itu pihak bank juga memiliki mekanisme untuk memberikan surat peringatan kepada nasabah yang wanprestasi tetapi, tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa.

keywords = Wanprestasi; perbankan syariah; pembiayaan; murabahah
url = <http://repository.ubb.ac.id/5983/>

KUMPULAN ABSTRAK LULUSAN TAHUN 2023



Analisis yuridis pembatalan hibah berdasarkan putusan pengadilan tinggi agama Palu Nomor: 0018/PDT.G/2017/PTA.PAL

Achmad Fahrul Rozi
NIM. .4011611001

Abstrak

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk mengetahui Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu: Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Bagaimana Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu: Penerima Hibah seharusnya tetap mendapatkan Haknya yaitu 1/3 bagian dari harta yang dihibah oleh Pemberi Hibah. Penulis menyarankan. Seharusnya hakim mempertimbangkan akibat Hukum dari pembatalan hibah, sebagaimana harus mengedepankan perlindungan hukum bagi penerima hibah yang berhak akan 1/3 harta yang dihibah bukan pembatalan seluruhnya.

keywords = Akibat hukum; syarat hibah; pembatalan hibah
url = <http://repository.ubb.ac.id/7738>

Analisis yuridis perjanjian jual putus dalam pengalihan hak ekonomi atas hak cipta

Amanda Try Ayu Kinanti
NIM. 4011911088

Abstrak

Jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun maka hak ekonomi yang dialihkan melalui perjanjian jual putus akan kembali ke pencipta. Dengan adanya pembatasan waktu, perjanjian jual putus hanya berstatus sewa-menyeWA karena terdapat pengalihan hak kepemilikan hak ekonomi secara dua kali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pengalihan hak ekonomi atas hak cipta dalam perjanjian jual putus berdasarkan konsep hukum perjanjian serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak pembeli atas pengalihan hak ekonomi suatu hak cipta dalam perjanjian jual beli putus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini, pertama berdasarkan Pasal 1319 dan 1338 KUHPerdata perjanjian jual putus yang dibuat oleh para pihak dianggap sah dan harus tunduk pada aspek hukum perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, perlindungan hukum untuk pihak pembeli belum optimal dikarenakan terdapat pembatasan waktu 25 tahun dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta.

keywords = Perjanjian; jual putus; pengalihan hak ekonomi
url = <http://repository.ubb.ac.id/8190>

**Kekuatan hukum lelang online berdasarkan peraturan menteri nomor
213/pmk.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang**

Anisah Wijaya
NIM. 4011911032

Abstrak

Kemajuan teknologi memberi dampak dalam setiap bidang. Salah satu kegiatan jual beli menggunakan media online yaitu lelang. Pelaksanaan lelang secara online melalui Platform Online ini memiliki sisi kelemahannya. Baik itu dari objek lelang, tempat pelaksanaan lelang serta kekuatan hukum dari dari penyelenggaraan lelang yang dilakukan secara online. Tujuan Penelitian ini untuk memberikan informasi kepada para penyelenggara lelang online bagaimana penyelenggaraan lelang online yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum lelang yang dilakukan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : pertama, kekuatan hukum lelang online dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, masih lemah terutama dalam hal objek lelang atau lebih tepatnya penguasaan objek lelang ketika para pemenang lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai penguasaan objek lelang terutama dalam lelang objek jaminan. Lelang. Kedua, perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beriktikad baik adalah ketika para penawar lelang melakukan pelelangan online melalui platform online yang sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku serta pemenang lelang yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif.

keywords = Kekuatan hukum; perjanjian lelang; lelang online
url = <http://repository.ubb.ac.id/8088>

Status kepemilikan rumah susun setelah berakhirnya hak guna bangunan

Armila
NIM. 4011811003

Abstrak

Satuan Rumah susun merupakan unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum sebagaimana diatur secara rinci dalam Undang-Undang Rumah Susun. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang satuan rumah susun setelah berakhirnya hak guna bangunan diatas hak pengelolaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang satuan rumah susun setelah berakhirnya hak guna bangunan diatas hak pengelolaan. Metode Penelitian yang digunakan ialah Yuridis-Normatif dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya peraturan yang jelas tentang status hukum jika hak guna bangunan diatas hak pengelolaan tersebut berakhir dan perlindungan bagi pemegang satuan rumah susun, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus maka yang akan terkena dampaknya ialah masyarakat atau penghuni rumah susun itu sendiri.

keywords = Rumah susun; hak guna bangunan; perlindungan hukum},
url = <http://repository.ubb.ac.id/7882>

**Analisis yuridis pengalihan hak rahasia dagang sebagai objek wakaf
perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf**

Betry Soraya Simamora

NIM. 4011911036

Abstrak

Ketentuan pengalihan hak rahasia dagang sebagai objek wakaf terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan turunannya, namun UU Wakaf tidak mengatur secara khusus mengenai pengalihan hak, kriteria, serta pengamanan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan karakteristik rahasia dagang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan hukum wakaf hak rahasia dagang dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hak rahasia dagang yang diwakafkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kekosongan hukum terkait tata cara pengalihan hak yang sesuai dengan karakteristik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran di DJKI sehingga tidak memiliki bukti otentik berupa sertifikat HKI yang menyulitkan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanpa adanya AIW, pengalihan hak rahasia dagang menjadi benda wakaf tidak memenuhi aspek legal formal yang diperlukan untuk diakui kekuatan hukumnya. Tidak adanya regulasi yang mengatur secara konkrit pelaksanaan wakaf hak rahasia dagang mengakibatkan ketidakpastian terhadap perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang yang diwakafkan.

keywords = Wakaf; pengalihan hak rahasia dagang; objek wakaf
url = <http://repository.ubb.ac.id/7994>

Keabsahan perjanjian yang dibuat oleh orang dengan down syndrome

Desea Natalina
NIM. 4011911095

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa orang yang dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, salah satunya adalah orang yang berada dibawah pengampuan dalam hal ini membahas sindrom down. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa orang dengan sindrom down dianggap sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum seperti orang normal lainnya termasuk cakap untuk melakukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan serta akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh orang down syndrome. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwanya penyandang disabilitas dapat melakukan perjanjian dengan berdasarkan syarat sah perjanjian dengan di dampingi oleh wakil karena berada di bawah pengampuan dan persetujuan serta adanya bukti putusan dari pengadilan bahwa perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian maka perjanjian itu memiliki dua akibat hukum yakni dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

keywords = Keabsahan perjanjian; penyandang disabilitas; sindrom down
url = <http://repository.ubb.ac.id/8178>

Kepastian hukum jual beli tanah di bawah tangan

Dhika Yudhistira
NIM. 4011711005

Abstrak

Jual beli tanah sebagai sarana dan bentuk proses peralihan hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria jo Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis kekuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan dan menganalisis kedudukan perjanjian dan bentuk perlindungan hukum terhadap jual beli tanah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian keabsahan jual beli tanah di bawah tangan tetap dianggap sah, sepanjang kedua belah pihak mengakui akta di bawah tangan yang telah di tanda tangani, maka jaminan hukumnya sama dan dianggap sebagai perjanjian yang sempurna, yang membedakan akta otentik dengan akta di bawah tangan hanyalah dari prosedur pembuatan akta tersebut. Kemudian kedudukan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dapat dijelaskan oleh Pasal 1319 KUH Perdata. Perjanjian di bawah tangan sudah dapat dijadikan suatu perlindungan hukum tentang keabsahan dalam perbuatan hukum jual-beli hak atas tanah tersebut, meski kekuatan pembuktianya adalah lemah.

keywords = Jual beli tanah; di bawah tangan; agraria
url = <http://repository.ubb.ac.id/7637>

Keabsahan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi dalam peer to peer lending

Dinar Rosyada
NIM. 4011911009

Abstrak

Layanan Peer To Peer Lending merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian antara pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman termasuk dalam suatu hubungan hukum. Jika terjadi risiko gagal bayar yang disebabkan oleh penerima pinjaman pihak penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Hal tersebut sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan peraturan yang ada pada POJK No.77/Pojk.01/2016. Adanya perbuatan melawan hukum tersebut pihak penyelenggara masih tetap mencantumkan klausula eksonerasi yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui apa klausula eksonerasi dalam hukum perjanjian Indonesia; kedua, untuk mengetahui apa keabsahan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi dalam Peer To Peer Lending. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini membuktikan jika : pertama, bahwa klausula eksonerasi dalam hukum perjanjian Indonesia pada pinjam meminjam uang melalui Peer To Peer Lending yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pada pemberi pinjaman merupakan perjanjian yang tidak dibolehkan karena merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, bahwa keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada Peer To Peer Lending belum diatur. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk dapat batal demi hukum hal ini juga khususnya Otoritas Jasa Keuangan agar segera menerbitkan aturan mengenai tanggung jawab pihak penyelenggara Peer To Peer Lending jika terjadi gagal bayar yang disebabkan oleh pihak pemberi pinjaman.

keywords = Keabsahan perjanjian; klausula eksonerasi; peer to peer lending
url = <http://repository.ubb.ac.id/8098>

Kekuatan hukum bagi pendaftar pertama dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia

Fheta Morgika Dealesta

NIM. 4011911044

Abstrak

Pada dasarnya sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif atau dikenal dengan nama prinsip first to file. Artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang lebih dulu didaftarkan. Maksud dari dipersamakan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum pendaftaran merek bagi pendaftar pertama di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum pendaftaran merek bagi pendaftar pertama jika terjadi persamaan merek yang diklaim oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini, pertama kekuatan hukum bagi pendaftar pertama dalam sistem pendaftaran merek masih terdapat celah hukum, sampai saat ini sistem pendaftaran first to file di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan. Kedua, akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat berupa ganti rugi, penghapusan merek, dan sanksi pidana.

keywords = Kekuatan hukum; sistem pendaftaran merek; pendaftar pertama
url = <http://repository.ubb.ac.id/8083>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara wanprestasi surat pernyataan hutang (studi kasus putusan 40/Pdt.g/2020/PN Sgl)

Hafiz Jutawan Sarwar
NIM. 4011911047

Abstrak

Permasalahan dalam skripsi ini adalah ruang lingkup surat pernyataan hutang pada perjanjian dan pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Sungailiat pada masa pandemi covid-19 dalam Putusan 40/Pdt.g/2020.PN.Sgl. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ruang lingkup dari surat pernyataan hutang dalam perjanjian dan pelaksanaan mediasi pada pandemi covid-19 dalam Putusan 40/Pdt.g/2020.PN.Sgl. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, dan dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Study), dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan hutang bukan perjanjian tetapi pengakuan sepihak oleh debitur mengenai hutang yang memiliki kekuatan mengikat bergantung kepada perjanjian pokok dan mediasi pada pandemi covid-19 dapat dilaksanakan secara tatap muka (offline) dan komunikasi audio visual (online), namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mengatur secara spesifik bagaimana pelaksanaannya.

keywords = Mediasi; wanprestasi; hutang
url = <http://repository.ubb.ac.id/8367>

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penerapan persyaratan hygiene sanitasi produk makanan oleh pelaku usaha (studi kasus usaha mikro di kota Pangkalpinang)

Juwita Alisandri
NIM. 4011911100

Abstrak

Penerapan persyaratan hygiene sanitasi adalah salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan. Beberapa pelaku usaha di Kota Pangkalpinang terkesan mengabaikan hal tersebut. Hal ini melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pangan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yaitu kerugian materiil dan immateriil. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada kerugian yang dilaporkan oleh konsumen kepada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, namun bukan berarti konsumen tidak dirugikan atas pelanggaran persyaratan hygiene sanitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan persyaratan hygiene sanitasi oleh pelaku usaha mikro di Kota Pangkalpinang serta untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan terhadap pelanggaran pelaksanaan persyaratan hygiene sanitasi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini pertama, penerapan persyaratan hygiene sanitasi produk makanan oleh pelaku usaha adalah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen berupa pertanggungjawaban preventif maupun represif. Pelaku usaha akan selalu bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan tidak bersalah atas kerugian konsumen yang disebabkan karena wanprestasi atau kerugian konsumen karena perbuatan melawan hukum.

keywords = Hygiene sanitasi; perlindungan konsumen; makanan
url = <http://repository.ubb.ac.id/7601>

**Putusan hakim pengadilan agama purbalingga nomor
0181/pdt.p/2015/pa.pbg terkait pembatalan perkawinan karena tidak
memenuhi rasa adil**

Nadien Salsabila
NIM. 4011911104

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peristiwa pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Purbalingga melalui putusan hakim nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg. Pembatalan perkawinan merupakan tindak putusan Pengadilan yang mendalilkan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan antara suami dan isteri tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan jikalau masing-masing dari kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya unsur ancaman dan paksaan pada perkawinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di dalam suatu pengadilan agama serta untuk mengetahui terkait unsur paksaan dalam suatu perkawinan apakah dapat dijadikan dasar pelaksanaan pembatalan perkawinan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan telah mengikuti prosedural pemberlakuan hukum positif yang berlaku selain itu unsur paksaan yang menjadi dasar pengabulan permohonan pembatalan perkawinan pada kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan norma agama yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg Hakim seharusnya tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan pengakuan formal yang diajukan oleh pemohon.

keywords = Pembatalan perkawinan; pertimbangan hakim; putusan hakim;
unsur paksaan
url = <http://repository.ubb.ac.id/8001>

Perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan qrис (quick response code Indonesian standard) sebagai media transaksi elektronik

Nelsi Deswita
NIM. 4011911106

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan financial technology (FinTech), ditandai dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan layanan jasa keuangan, pada tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia meluncurkan QRIS (Quick Response Indonesian Standard). Aturan hukum yang mengatur QRIS saat ini masih kabur karena PADG QRIS sebagai aturan implementasi QRIS belum sepenuhnya mengakomodasi terkait dengan perlindungan konsumen serta sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna QRIS dalam menyelesaikan permasalahannya. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang mempunyai sifat preskriptif dengan menggunakan metode pendekatan analitis (analytical approach), sumber data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan teknik analitis kualitatif. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan QRIS ada akan tetapi kabur karena dalam PADG QRIS sebagai aturan pelaksana implementasi QRIS belum dengan jelas menjelaskan bentuk perlindungan konsumen dalam QRIS. Dalam upaya penyelesaian sengketa atau permasalahan konsumen dalam QRIS ada akan tetapi kabur, hal ini disebabkan pengenaan sanksi yang belum secara jelas dalam PADG QRIS dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem sebagai peraturan yang mengakomodir QRIS.

keywords = QRIS; pembayaran elektronik; transaksi elektronik; perlindungan hukum
url = <http://repository.ubb.ac.id/7727>

**Pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce terhadap penyalahgunaan
data pribadi konsumen dalam perspektif undang-undang nomor 27 tahun
2022 tentang perlindungan data pribadi**

Nisa Aulia Rahmadani

NIM. 4011911016

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga merupakan hak pribadi data konsumen yaitu menyangkut informasi pribadi yang rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce yang melakukan kegiatan bisnis e-commerce rumahan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif UU PDP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk perlindungan hukum konsumen yang data pribadinya disalahgunakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce skala rumahan tidak diatur dalam UU PDP, sehingga menjadikan UU PDP belum sepenuhnya bisa melindungi data pribadi konsumen.

keywords = Perlindungan hukum; e-commerce; data pribadi
url = <http://repository.ubb.ac.id/8123>

**Keabsahan perjanjian waralaba atas usaha yang berjalan kurang dari dua tahun berdasarkan hukum perdata di Indonesia
(studi kasus perjanjian waralaba traffic bun)**

Novela Riren
NIM. 4011911061

Abstrak

Di masa ini, perjanjian waralaba sudah sering digunakan pada dunia bisnis usaha makanan. Salah satu usaha di bidang makanan yang saat ini sedang berkembang adalah Traffic Bun. Traffic Bun membuka kedai pertamanya di Jakarta pada Maret 2021. Pada September 2022, Traffic Bun pun mulai membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang hendak melakukan usaha waralaba. Apabila diperhatikan, pembukaan waralaba Traffic Bun tersebut sangatlah cepat, yakni berkisar 1 tahun 6 bulan. Hal ini tampak tidak sejalan dengan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemberi waralaba pada PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan kriteria waralaba pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum atas perjanjian waralaba yang dilakukan pada usaha yang berjalan kurang dari dua tahun berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Hal ini yang kemudian menyebabkan perjanjian waralaba yang dilaksanakan dikatakan tidak sah sehingga berakibat pada perjanjian waralaba yang dibuat antara para pihak batal demi hukum.

keywords = Perjanjian; waralaba (Franchise); traffic bun
url = <http://repository.ubb.ac.id/8389>

**Perlindungan hukum terhadap pasien pengobatan tradisional dalam
perspektif hukum kesehatan**

Novira Metrianti
NIM. 4011811011

Abstrak

Pengobatan tradisional merupakan suatu upaya kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan di atur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien dan upaya hukum yang dapat dilakukan pasien apabila terjadi malpraktik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pasien serta upaya hukum yang dapat di lakukan pasien apabila terjadi malpraktik. Hasil penelitian menunjukan hak-hak pasien bisa terpenuhi jika syarat dan standar suatu pelayanan kesehatan terpenuhi. Bila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa kesehatan dalam hal ini penyelenggara kesehatan dalam kontek pengobatan alternatif, maka penyedia jasa pengobatan alternatif dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen.

keywords = Pengobatan tradisional; pasien; perlindungan hukum
url = <http://repository.ubb.ac.id/6862>

**Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal varietas lokal
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Reiner Indra Putra Muara Simaremare

NIM. 4011911066

Abstrak

Varietas lokal adalah varietas yang telah lama ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat. Varietas lokal merupakan bagian dari sumber daya genetik yang termasuk ke dalam kekayaan intelektual komunal sehingga perlu untuk diberikan perlindungan hukum agar masyarakat pemilik varietas lokal tersebut dapat memperoleh hak-hak keperdataan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap varietas lokal dan bagaimana upaya yang telah ditempuh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap varietas lokal selaku kekayaan intelektual komunal. Metode penelitian yang digunakan yakni metode empiris yang mempunyai sifat preskriptif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, metode dokumenter dan metode studi pustaka serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, perlindungan hukum terhadap varietas lokal di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pendaftaran varietas lokal ke Kantor Pusat PVTTP, dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat tanda daftar. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal varietas lokal melalui kegiatan pendaftaran varietas lokal, pencatatan varietas lokal yang ada, sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, pelepasan varietas, pelestarian varietas lokal hingga pengawasan terhadap varietas lokal. Namun pelaksanaanya belum optimal karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat.

keywords = Perlindungan hukum; kekayaan intelektual komunal; varietas lokal
url = <http://repository.ubb.ac.id/8079>

Akibat hukum pengambilan hak atas tanah masyarakat dalam penggunaan lahan hak guna usaha yang melebihi batas di Kecamatan Lepar Pongok

Reyuka
NIM. 4011811048

Abstrak

Tanah merupakan objek kebendaan yang sangat penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang mendasar, selain itu tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan bersifat permanen, tanah kuantitasnya terbatas dan tetap, sehingga dengan pentingnya tanah bagi setiap orang menyebabkan terjadinya Pengambilan Hak atas Tanah Masyarakat tanah yang sudah sering kali terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum dan Bentuk Ganti Rugi atas Pengambilan Hak atas Tanah Masyarakat Dalam Penggunaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang Melebihi Batas di Kecamatan Lepar Pongok. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari bagaimana Akibat Hukum Pengambilan Hak atas Tanah Masyarakat Dalam Penggunaan Lahan Hak Guna Usaha yang Melebihi Batas di Kecamatan Lepar Pongok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum Pengambilan Hak atas Tanah Masyarakat kepemilikan tanah masyarakat terhadap penggunaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang melebihi batas di Kecamatan Lepar Pongok yaitu terjadinya perbuatan melawan hukum menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi. Dalam hal Bentuk Ganti Rugi perusahaan kepada masyarakat yaitu dengan mengganti rugi dalam bentuk kompensasi materiil.

keywords = akibat hukum; pengambilan hak atas tanah; hak guna usaha
url = <http://repository.ubb.ac.id/6867>

**Sengketa jual beli tanah waris tanpa ada persetujuan ahli waris di
Kabupaten Bangka**

Rifani Nabila Amanda
NIM. 4011911110

Abstrak

Sengketa pertanahan saat ini menjadi perhatian bersama. Saat ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat dilihat dengan adanya kemajuan ekonomi, salah satunya meningkatnya aktivitas seperti jual beli tanah. Meskipun tanah memiliki potensi jangka panjang seringkali terjadi sengketa dalam jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis jual beli tanah waris tanpa ada persetujuan ahli waris, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap jual beli tanah waris tanpa ada persetujuan ahli waris. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, dan dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Study), dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dalam kasus 13/Pdt.G/2022 adanya jual beli tanah waris tanpa ada persetujuan ahli waris dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, Akta Pernyataan Waris, Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan keterangan palsu dan tidak diikut sertakannya salah satu ahli waris yang berhak. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, akibat hukum atas sengketa jual beli tanah waris tanpa ada persetujuan ahli waris yang telah terjadi batal demi hukum. Agar jual beli tanah tersebut terjamin keabsahannya maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam menandatangani perjanjian jual beli warisan tersebut di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).

keywords = Sengketa; jual beli tanah; ahli waris
url = <http://repository.ubb.ac.id/7603>

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan snack merek terkenal yang telah kadaluarsa dan dikemas ulang

Vanetta Novania Theny

NIM. 4011911115

Abstrak

Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum menunjukkan adanya keberpihakan serta terakomodasinya keluhan-keluhan dari konsumen. Lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen rupanya telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjual produksinya yang tidak sesuai dengan standard yang telah tentukan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang yang tidak aman dan dibawah standar. Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu timbulnya kecurangan di antara hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Salah satunya adalah melakukan penjualan makanan ringan yang telah kadaluarsa dan dikemas ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan snack merek terkenal dan dikemas ulang dalam pelaksanaannya belum optimal. Konsumen dapat melakukan upaya seperti meminta perlindungan kepada pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang.

keywords = Perlindungan hukum; konsumen; merek terkenal; kadaluarsa

url = <http://repository.ubb.ac.id/8182>

**Kekuatan hukum eksekusi penjualan di bawah tangan dalam hukum
jaminan ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia
(studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pgp)**

Wulan Dwiningrum
NIM. 4011611087

Abstrak

Penjaminan atas pelunasan utang debitur menggunakan jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tetapi hanya hak kepemilikannya yang berpindah. Salah satu kemudahan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan hak tagihnya agar harga objek jaminan fidusia tidak turun yaitu dengan menggunakan eksekusi penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan dari pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi untuk mempermudah penjualan objek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum mekanisme mengenai pelaksanaan eksekusi penjualan di bawah tangan oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui kekuatan hukum eksekusi penjualan di bawah tangan terhadap debitur yang wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kekuatan hukum eksekusi penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pgp ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah memiliki kekuatan hukum baik secara formil maupun materil. kedua, Mengenai Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka Setiap pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia harus merupakan jaminan fidusia yang akta jaminan fidusia dibuat secara notariil dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia serta pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila debitur wanprestasi.

keywords = Kekuatan hukum; eksekusi penjualan di bawah tangan; hukum
jaminan; jaminan fidusia
url = <http://repository.ubb.ac.id/7804>